



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN, DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU
TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI, DAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: 13 (Tiga Belas)
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 6 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.10 WIB s.d.16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: Progres pelaksanaan kegiatan TA 2022
Hadir	: 35 anggota hadir dari 52 orang anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/ Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang anggota dari 11 anggota

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Ismail Thomas, SH, M.Si.
7. Herman Hery

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin
4. Bambang Hemanto, S.E.
5. Bambang Patijaya, S.E, M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Katherine A. Oendoen.
3. H. Iwan Kurniawan, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rian Firmansyah, S.Pd.
3. Arkanata Akram, S.T, B.E (Hons), M.Eng.Sc.
4. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
4. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E, M.Si.
2. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
2. Dadan Kusdiana (Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi)
3. Ir. Rida Mulyana, M.Sc. (Direktur Jenderal Ketenagalistrikan)
4. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Ph.D. (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi Sumber Daya Mineral)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera kami sampaikan.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI hadir melalui *virtual*, tadi sudah kami komunikasi sama beliau-beliaunya.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir fisik langsung maupun melalui *virtual* juga.

Yang kami hormati seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian ESDM Republik Indonesia, Saudara Sekjen, Saudara Dirjen Ketenagalistrikan, Saudara Dirjen EBTKE dan juga Kepala BPSDM serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama sudah barang tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa bahwa kita telah dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan dan juga semua ini adalah guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan memulai melaksanakan rangkaian Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 yang diawali oleh Sekjen, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan Kepala BPSDM dengan agenda, progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan sudah barang tentu dengan menyampaikan daftar kegiatan satuan 3.

Bapak/Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 24 anggota dan terdiri dari 8 fraksi, dengan demikian sebagaimana Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) kuorum telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan anggota, agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah disetujui Bapak/Ibu sekalian?

Setuju. Baiklah, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pukul 14, eh 12.15 WIB menit dan kurang lebih 2 jam sejak dimulai ini dan rapat ini dapat diperpanjang apabila disetujui, setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum dilanjutkan rapat ini, saya mau memperkenalkan Anggota Komisi VII DPR RI yang baru, yakni yang terhormat Bapak Bambang Dwi Hartono A-206, beliau adalah dari Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya di Komisi III, betul Pak Bambang, oh maaf kok di sini PDI Perjuangan, Golkar ya sebelumnya di Komisi III betul, oh V, salah-salah ini, kacau ini.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Yang PDI Perjuangan Perjuangan itu Ganjar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dan kemungkinan dipasangkan dengan Anis begitu maksudnya. Jadi Pak Bambang Dwi Hartono ya, Bambang Hermanto. Oh ada 2 Bambang, ya, ya *oke, oke*. Pak Bambang Hermanto dari Fraksi Golkar betul, sebelumnya di

Komisi V dan sekarang di Komisi VII. Selamat datang Pak Bambang Hermanto, inilah Komisi VII dengan berbagai dinamikanya dan juga ada dari PDI Perjuangan Pak Bambang Dwi Hartono, belum hadir mungkin, dari partai, maaf, dari Komisi III menggantikan Bapak Novri Ompusungguh yang kini pindah ke Komisi III.

Baiklah Bapak/Ibu sekalian.

Dalam rangka pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023, Komisi VII DPR RI akan mendalami realisasi RKA kementerian lembaga yakni Kementerian ESDM Republik Indonesia pada tahun anggaran 2022 dengan total anggaran Kementerian ESDM Republik Indonesia adalah sebesar Rp.5,9 triliun dari total APBN tahun 2022 Kementerian ESDM Republik Indonesia sebesar 49%-nya direncanakan dialokasikan untuk masyarakat. Dari anggaran tersebut Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara detail perihal realisasinya per Juni 2022 ini, khususnya untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

Beberapa program langsung menyentuh masyarakat yang terkait pada Eselon Kementerian ESDM Republik Indonesia yang hadir pada saat ini adalah di antaranya program *converter kit* atau conkit nelayan, conkit petani, PJU TS, revitalisasi EBT, alat penyalur daya listrik atau Apdal, bantuan pasang baru listrik, PLTS atap dan PLTMH.

Bapak/Ibu sekalian.

Adapun Menteri ESDM Republik Indonesia pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI sebelumnya menyampaikan bahwa realisasi serapan anggaran Kementerian ESDM pada kuartal 1 2022 telah mencapai Rp459 miliar dengan realisasi tertinggi Sekjen dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Republik Indonesia. Komisi VII DPR RI memandang penting pengawasan pelaksanaan anggaran tahun 2022 supaya dapat lebih baik dari tahun 2021, khususnya dalam memprioritaskan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu dipersilahkan Sekjen Kementerian ESDM untuk membuka dan memaparkan progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatannya, nanti dilanjutkan paparan dari Dirjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE dan Kepala BPSDM.

Dipersilakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi, Kepala BPSDM dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan Kepala BPSDM dengan agenda progres pelaksanaan kegiatan Kementerian ESDM tahun anggaran 2022.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Izinkan kami, sebelum memaparkan untuk per unit Eselon 1 untuk memberikan pemaparan secara *overall* terkait dengan kinerja Kementerian ESDM terkait penggunaan anggaran hingga akhir bulan Mei 2022 ini.

Slide berikutnya, terkait dengan realisasi anggaran tahun 2022 dapat kami sampaikan, sebagai upaya untuk kita terus menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, anggaran operasional setiap unit utama telah ditekan atau diturunkan sehingga anggaran Rp5.906.000.000.000,- didistribusikan dengan postur seperti tertera dari jenis belanja adalah pegawai sebesar 15,5% atau 19 ...(*suara tidak jelas*)... atau 913,5 miliar. Belanja barang dengan porsi 55% atau Rp3,2 triliun dan belanja modal sebesar 1,79 triliun atau 29,6%. Dari sisi sumber dananya, rupiah murni sebesar 83% atau 4,9 triliun, penerimaan bukan pajak atau PNPB sebesar 544 miliar atau 9,2%, Badan Layanan Umum sebesar 457,8 miliar atau 7,8% dan hibah luar negeri sebesar 4,7 miliar atau 0,1%.

Slide berikutnya, dilihat dari sisi pemanfaatan anggaran, alokasi terbesar ditujukan adalah untuk mendukung kegiatan infrastruktur dan survei dengan nilai sebesar Rp2.910.000.000.000,- atau 49,2%. Selanjutnya untuk kegiatan operasional dan pelayanan internal sebesar 2,07 triliun atau 35% dan publik nonfisik sebesar 928,7 miliar atau 15,8%. Anggaran cukup besar dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam karena memiliki dampak langsung kepada masyarakat melalui program-program, antara lain, jaringan gas kota, *converter kit* untuk nelayan, *converter kit* untuk petani, PJUTS, revitalisasi EBT, Alat Penyalur Daya Listrik atau Apdal, bantuan pasang baru listrik, PLTS atap, PLTMH pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi bencana geologi dan pusat informasi geologi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan public, dilaksanakan juga kegiatan publik non fisik, antara lain pelayanan publik BLU atau Badan Layanan Umum, pembinaan dan pengawasan badan usaha dan kelancaran distribusi bahan bakar, penyiapan diseminasi dan monev implementasi kebijakan dan regulasi, pengelolaan data dan identifikasi serta pemetaan sumber daya alam. Sedangkan untuk

memperkuat kerja mesin organisasi dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan kegiatan pelayanan internal kementerian dan lembaga, antara lain gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM dan pengawasan internal.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan dari alokasi Rp5.900.000.000.000,- tersebut di atas, oleh pemerintah, dalam hal ini c.q Kementerian Keuangan terpaksa mengambil kebijakan pencadangan anggaran atau disebut sebagai *automatic adjustment* pada setiap kementerian dan lembaga dalam rangkaantisipasi penanganan pandemi Covid-19, serta antisipasi terhadap meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik.

Pencadangan anggaran yang dilakukan dengan blokir mandiri atau *self blocking* dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu tahap pertama sebesar 244,9 miliar dengan kriteria yaitu tunjangan kinerja ke-13, THR, honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting* serta kegiatan yang diblokir di awal DIPA atau APBN. Dan kriterianya adalah anggaran tidak tersebar sesuai dengan hasil pembahasan kita dengan Dirjen Anggaran merupakan kegiatan infrastruktur yaitu konkit nelayan, bantuan pasang baru listrik dan PLTS atap. Selanjutnya terjadi *automatic* atau *self* mandiri *blocking* juga pada tahap ke-2, kita mendapat potongan 329,5 miliar yaitu dengan kriteria belanja barang dan modal yang belum berkontrak per 25 Mei tahun 2022.

Dapat kami sampaikan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang kami hormati, pada tahap 2 ini terdapat dana sebesar 483 miliar untuk program pipa transmisi gas ruas batang Cirebon yang *idle* karena sesuai dengan rekomendasi BPKP ditunda pelaksanaan pembangunannya. Untuk itu dana tersebut digunakan untuk:

1. Menukar *automatic adjustment* konkit nelayan sebesar 116,9 miliar.
2. Pemenuhan *automatic adjustment* tahap kedua sebesar 329,5 miliar dan sisanya 36,7 miliar diusulkan untuk modernisasi peralatan mitigasi bencana geologi sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada saat terjadinya peningkatan aktivitas gunung api Semeru pada tanggal 4 Desember tahun 2021 lalu.

Sehingga total blokir mandiri *automatic adjustment* untuk tahap 1 dan tahap 2 adalah sebesar 574,5 miliar diambil dari Tukin ke-13 atau tunjangan kinerja ke-13, THR sebesar 42,4 miliar. Bantuan pasang baru listrik tetap sebesar 60 miliar, PLTS atap tetap sebesar 25,7 miliar, pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang ruas batang Cirebon sebesar 446,4 miliar. Sedangkan konkit nelayan tidak jadi diblokir mandiri dan diusulkan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana awal APBN.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Secara umum realisasi anggaran per 31 Mei 2022 pada seluruh unit utama melampaui target mencapai 1,2 triliun atau 19,6% atau surplus sebesar 143,3 miliar atau 2,4% dari target sebesar 1 triliun atau 17,1%. Pada akhir

Desember 2022 ini, kita Kementerian ESDM mengharapkan realisasi dapat mencapai 5,7 triliun atau sebesar 96%.

Dapat kami sampaikan, Badan Litbang ESDM saat ini dalam tahap likuidasi satuan kerja, sehingga perkiraan sisa alokasi anggaran satker-satker lainnya akan dialihkan ke seluruh unit utama, yaitu Sekretariat Balitbang akan dialihkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian, Lemigas ke Ditjen Migas menjadi Balai Besar Pengujian Migas, P3T ke Ditjen EBTKE sebagai Balai Besar Survei dan Pengujian EBTKE, Tekmira ke Dirjen Minerba sebagai Balai Besar Pengujian Minerba dan Puslitbang Geologi Kelautan ke Badan Geologi sebagai Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

Berikutnya Pimpinan, kami akan menyampaikan progres pengadaan barang dan jasa tahun 2022 ini per status 31 Mei 2022. Total paket strategis sebanyak 115 paket atau 2,9 triliun menjadi 104 paket atau 2,7 triliun dilakukan dengan mekanisme tender atau seleksi. Dan sisanya 11 paket atau 0,5 triliun adalah paket pekerjaan non tender yaitu berupa penugasan izin *multiyears* kontrak tahun 2021, swakelola tahap kedua atau swakelola tahap 2.

Paket tender terseleksi, yang tender seleksi tadi yang 104 paket seluruhnya 93% sudah berkontrak. Sedangkan progres tender dari 104 paket atau 2,4 triliun tersebut antara lain 14 paket atau 65,4% belum tender, 4 paket atau 61,4 miliar sedang proses tender, selesai tender proses kontrak sebanyak 2 paket atau 28,4 miliar, sudah kontrak atau terdaftar di span sebanyak 84 paket atau 2,3 triliun dengan nilai kontrak 1,5 triliun.

Masih terdapat 14 paket belum tender tersebar pada 7 unit, antara lain unit Ditjen Minerba sebanyak 5 paket, ini rata-rata adalah merupakan paket aplikasi, unit Ditjen Migas sebanyak 3 paket yaitu 2 paket unit untuk monetisasi konkrit nelayan dan petani dan 1 paket untuk konsultan. Dua paket di Ditjen EBTKE yaitu paket baru berupa PLTS atap untuk wilayah Indonesia 2 dan monevnya. 1 paket di BPH yaitu renovasi lantai dasar gedung, 1 paket di Ditjen Ketenagalistrikan berupa renovasi lanjutan gedung Sumantri Brojonegoro dan 1 paket di sekretariat jenderal berupa otomatisasi sarana gedung dan pendukung.

Terkait dengan paket nontender yaitu sebanyak 11 paket dengan total anggaran 500 miliar dapat kami sampaikan sebagai berikut Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Di Ditjen Migas ada 2 paket yaitu sebesar 356,8 miliar yaitu adalah berupa konkrit nelayan dan petani. Saat ini statusnya sudah terbit Kepmen penugasan dan saat ini proses kontrak sedang dilakukan dengan Pertamina.

Di Ditjen Ketenagalistrikan adalah 1 paket sebesar 50,8 miliar adalah program BPBL juga status saat ini sudah terbit Kepmen penugasannya dan saat ini sedang dalam proses pembicaraan untuk proses kontrak dengan PLN.

Di Ditjen EBTKE ada 8 paket sebesar 157,1 miliar sudah dilaksanakan dan sudah terdaftar di span yaitu adalah 2 paket Apdal, 2 paket monev Apdal dan 2 paket TJUTS dan 2 paket monev PJU TS.

Dapat kami sampaikan progres kegiatan infrastruktur tahun 2022 sampai tanggal 31 Mei adalah sebagai berikut:

Di bidang migas:

- Pipa transmisi tahap 1 ruas sistem sudah tanda tangan kontrak per tanggal 17 Mei 2022.
- Jaringan gas kota untuk 40.777 sambungan rumah di 12 kabupaten kota berupa 5 paket sudah tanda tangan kontrak.
- Conkit nelayan 30.000 paket di 15 provinsi telah terbit Kepmen penugasan dan saat ini sedang dalam proses untuk kontrak dengan Pertamina.
- Conkit petani 30.000 paket di 16 provinsi juga telah terbit Kepmen penugasan dan saat ini proses kontrak dengan Pertamina.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi yang kami hormati.

Agar pelaksanaan kegiatan *converter kit* untuk nelayan dan petani dapat segera kami jalankan, kami mohon kepada Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII untuk dapat membantu kami dalam menyediakan data lokasi penerima conkit sesuai dengan wilayah dapil Bapak/Ibu sekalian.

Untuk bidang EBTKE dan Ketenagalistrikan:

- PLTS atap untuk kapasitas 3,8 megawatt untuk 185 unit di 33 provinsi, satu paket sudah berkontak untuk 79 unit dengan total kapasitas 2,3 megawatt dan 1 paket terkena paket *automatic adjustment*.
- PJU TS sebanyak 22.000 paket di 28 provinsi, 2 paket dalam pekerjaan tahun ke-2 artinya lanjutan dari pekerjaan tahun 2021 dan 2 paket baru di tahun 2022 status sudah berkontrak.
- PLTMH 3 unit di 2 provinsi, 3 paket sudah berkontrak.
- Apdal 11.365 paket di 2 provinsi telah berjalan dengan telah masuk dalam pekerjaan di tahun kedua.
- Sedangkan revitalisasi pembangkit listrik EBT sebanyak 6 unit di 6 provinsi dilakukan secara swakelola.
- Selanjutnya bantuan pasang baru listrik untuk 80.000 rumah tangga di 22 provinsi, dapat kami sampaikan regulasi berupa Kepmen penugasan telah terbit, surat perjanjian BPBL antara Ditjen Gatrik dan PLN sudah ditandatangani pada 23 Mei lalu, dimana untuk tahap pertama sebanyak 40.000 rumah tangga dan tahap kedua 40.000 rumah tangga namun terkena *automatic adjustment* karena belum berkontrak, saat ini sedang pengelolaan dan penyusunan SK penerimaan BPBL.

Untuk yang ini kami juga mohon kepada Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII untuk dapat segera menyampaikan membantu kami menyediakan data lokasi bantuan pasang baru listrik sesuai dengan wilayah dapil Bapak dan Ibu sekalian.

Yang ketiga, terkait dengan Badan Geologi yaitu berupa pengeboran *slim hole* Cisolok, Cisokarame statusnya masih dalam proses tender.

Terkait permintaan Anggota Dewan atas detail APBN tahun anggaran 2022 per unit Eselon 2 berdasarkan satuan 3 berdasarkan koordinasi kami dengan Sekretariat Komisi VII kami sudah menyampaikan dokumennya secara lengkap untuk setiap unit Eselon 1.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan, selanjutnya Bapak Pimpinan, mohon berkenan kami untuk memaparkan per unit Eselon 1, dimulai oleh sekjen setelah itu Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan BPSDM.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Pak Sekjen silakan dilanjutkan.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 untuk unit sekretariat jenderal dapat kami sampaikan bahwa anggaran sekretariat jenderal tahun anggaran 2022 adalah sebesar 292,9 miliar lebih rendah 70 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu sebesar 363,1, yang di distribusikan disini berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai 87,3 miliar atau 29,8%, belanja barang 200,3 miliar atau 68,4% dan belanja modal sebanyak 5,3% atau 1,8%.

Sedangkan dari sisi sumber dananya rupiah murni adalah sebesar 288,2 miliar atau 98,4% dan selebihnya adalah berupa hibah luar negeri sebesar 4,7% atau 1,6%. Dari alokasi 292,93 miliar tersebut dilakukan pencadangan anggaran dengan blokir mandiri atau *self blocking* sebesar 6,6 miliar pada belanja pegawai sebagai tindak lanjut surat Kementerian Keuangan terkait dengan *automatic adjustment* belanja KL tahun 2022. Anggaran tersebut Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi, belum termasuk rencana pengalihan anggaran Sekretariat Balitbang yang saat ini dalam proses likuidasi satuan kerja.

Secara umum dapat kami sampaikan realisasi anggaran setiap biro dan pusat per 31 Mei melampaui target yaitu mencapai 124,8 miliar atau 42,6% lebih tinggi 4,8 miliar atau 1,7% dibandingkan dengan target sebesar 120 miliar

atau 41%. Pada akhir 2 Desember diharapkan realisasi untuk unit sekretariat jenderal dapat mencapai 99% atau 291 miliar.

Izinkan kami menyampaikan progres kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama sekretaris jenderal, ini *list*-nya cukup banyak Bapak Pimpinan, mohon izin kami menyampaikan hal-hal yang paling penting, yaitu yang pertama antara lain adalah indeks reformasi birokrasi. Ini skalanya 100 dengan target di tahun 2022 sebesar 85,5%, saat ini kita sedang masih dalam proses pemulihan untuk tahun anggaran 2021 capaian yang kami capai baru sebesar 79,69 sedangkan target tahun ini kita ingin mencapai target dengan kualifikasi A yaitu 85,5%.

Nilai sakin adalah dengan skala 100 target 2022 adalah 81, proses pemilihan sedang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, dimana tahun 2021 lalu kami baru mencapai 78,3%. Indeks maturitas SPIP sekretariat jenderal dengan indeks atau skala 5 target 2022 adalah sebesar 3,7, progres saat ini sedang dalam proses pengumpulan data untuk mendukung penilaian di akhir tahun.

Selanjutnya kami dapat sampaikan mengenai presentasi realisasi PNB unit sekretariat jenderal dengan target sebesar 92%, sedangkan progres per April sebesar 1,14 miliar atau 13% dari target 8,83 miliar. Nah, terkait dengan penggunaan anggaran yaitu nilai IPKA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, nilai skala 100 untuk target tahun 2022 adalah sebesar 90,5% dimana untuk TW 1 tahun 2022 ini telah mencapai 98,24%, sedangkan TW 2 akan dihitung pada minggu pertama bulan Juli.

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian ESDM dengan target tahun 2022 ini adalah predikat WTP, penilaian tahun anggaran 2022 dilakukan pada semester 1 tahun anggaran 2023. Sedangkan kinerja untuk tahun 2021 yaitu predikat WTP dinilai dari semester 1 tahun 2022. Indeks kepuasan layanan dengan skala 4 target di tahun 2022 adalah 3,3 progres saat ini juga sedang dalam proses pemilihan.

Prosentasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM dengan target di tahun 2022 sebesar 77,5%, progres sampai saat ini telah terbit 10 Permen dari target 23 Permen hingga akhir tahun dan 22 Kepmen dari target 82 Kepmen hingga akhir tahun.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan pencapaian kinerja sekretariat jenderal, pertama adalah indeks, oh lanjutan, mohon izin. Indeks kualitas perencanaan dengan indeks 100, status saat ini kita telah mencapai 82. Prosentasi pemberitaan terkait dengan pemberitaan positif pada media dengan target tahun 2021 sebesar 92%, progres saat ini pemberitaan negatif terkait isu sektor ESDM hanya 33 dari 47.583 berita.

Terakhir Bapak Pimpinan, kami menyampaikan capaian adalah terkait dengan prosentase usulan pengelolaan barang milik negara di sektor ESDM pada target tahun 2022 sebesar 92,5%. Progres saat ini proses penyelesaian usulan pemusnahan, penghapusan, sebab-sebab lain, pemanfaatan,

pemindahtanganan serta usulan alih status penggunaan BMN yang berasal dari Kementerian ESDM, K3S dan PKB2B di Kementerian ESDM sebanyak 129 usulan.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan layanan internal atau program dukungan manajemen pada setiap biro dan pusat di lingkungan sekretariat jenderal. Pembayaran gaji dan tunjangan yaitu total sebanyak 1 layanan 87,3 miliar sedang dalam proses pembayaran hingga bulan Juni ini dan proses pembayaran tunjangan kinerja yang telah dilakukan hingga bulan April. Operasional dan pemeliharaan kantor berupa satu layanan total 83,4 miliar, progress juga sedang dilakukan hingga bulan Mei ini.

Terkait dengan progres pelaksanaan di biro dan pusat di lingkungan sekjen.

Layanan perencanaan 25 kegiatan sebesar 6,9 miliar progres saat ini 42%. Layanan di Biro Sumber Daya Manusia 22 kegiatan atau 7,4 miliar, realisasinya sebesar 45%. Layanan organisasi dan tata laksana 18 kegiatan dengan pagu 4 miliar dengan proses kegiatan 41,5 miliar. Layanan keuangan di Biro Keuangan 17 kegiatan sebesar 6,7 miliar dengan progres kegiatan Rp. 52,2 miliar. Layanan hukum 18 kegiatan 9,8 miliar dengan progres sebesar 35% dan progres penanganan permasalahan hukum sebesar 70%. Layanan manajemen internal sekretariat jenderal dan kearsipan sebanyak 33 kegiatan sebanyak 16,7 miliar dengan progres sebanyak 24%. Layanan informasi publik dan kerjasama untuk 26 kegiatan sebesar 12,3 miliar dengan progres pelaksanaan kegiatan sebesar 34%. Layanan data dan teknologi informasi untuk 7 kegiatan sebesar 43,6 miliar dengan progres telah mencapai 50%. Layanan pengelolaan barang milik negara untuk 14 kegiatan sebesar 12,8 miliar dengan progres telah mencapai 42% dan terakhir adalah layanan prasarana internal untuk 1 kegiatan 5,3 miliar belum dilaksanakan karena masih dalam proses penyempurnaan dokumen pengadaan.

Terakhir, proses pengadaan barang dan jasa tahun 2022 di lingkungan sekretariat jenderal terdapat 10 paket strategis pengadaan barang dan jasa dengan pagu 41,8 miliar, progress sampai dengan 31 Mei adalah 9 paket telah berkontrak dan dalam proses pekerjaan, sedangkan 1 paket optimalisasi sarana gedung dan pendukung belum dilaksanakan karena **penemuan** kembali dokumen pengadaan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Terkait permintaan Anggota Dewan atas detail pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 per unit Eselon 2 berdasarkan satuan 3 telah kami sampaikan secara terpisah ke Sekretariat Komisi VII.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan, selanjutnya izinkan Pimpinan kami untuk menyerahkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk menyampaikan realisasi pencapaian Ditjen Ketenagalistrikan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Dipersilakan Pak Dirjen Ketenagalistrikan.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Pak Sekjen.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izinkan kami juga mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri RDP terkait progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, khususnya di Kementerian ESDM lebih khususnya lagi di Ditjen Ketenagalistrikan.

Langsung saja, ada 3 agenda yang akan kami laporkan, mohon izin Bapak Pimpinan dan Ibu/Bapak sekalian. Yang pertama adalah mengenai capaian kinerja 2022, kemudian mengenai realisasi DIPA Ditjen Ketenagalistrikan sampai akhir Mei dan yang terakhir adalah progres kegiatan di Ditjen Ketenagalistrikan. Lanjut.

Bapak/Ibu sekalian.

Sebagaimana biasa kami sampaikan ke Bapak/Ibu sekalian, bahwa kami setiap tahun secara rutin selalu memantau indikator atau 15 indikator dari pembangunan ketenagalistrikan. Jadi, yang pertama sampai nomor 5 kalau boleh saya singkat adalah menyangkut pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama mungkin untuk Pak Bambang. Bapak, selamat datang Bapak, izin Pak menyampaikan secara detail.

Jadi di kami itu ada sedikit pemantauan mengenai kemajuan pembangunan infrastruktur Pak, mulai dari pembangkitan kita sampai kemudian distribusinya, di tengah-tengahnya ada kabel transmisi, di tengah-tengahnya ada kabel distribusi dan kabel distribusi. Itu setiap tahun kita pantau.

Kemudian yang indikator yang lainnya yang keenam adalah menyangkut tingkat konsumsi listrik per kapita, ini pun menjadi indikator nasional karena kenaikan dari konsumsi listrik perkapita adalah juga indikator dari kemajuan suatu bangsa dan *alhamdulillah* sampai saat ini kita telah mencapai konsumsi

pada tingkat 1.140 kWh per kapita atau kurang lebih naik 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021.

Indikator yang lainnya yaitu mengenai rasiofikasi ini dipantau setiap saat karena ini menyangkut keadilan, pemerataan, akses listrik untuk seluruh rakyat Indonesia untuk yang sampai yang saat ini triwulan 1 kita sudah mencapai 99,52% dari target 100%. Memang sedikit lagi yang kita belum capai tetapi karena banyak lokasinya makin terpencil ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga pencapaiannya agak sedikit tertunda-tunda.

Kemudian subsidi listrik juga kami pantau Bapak/Ibu sekalian, karena kita sudah punya kesepakatan untuk menjadikan subsidi listrik ini menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian infrastruktur pengisian kendaraan listrik atau *electric vehicle charging station* kita terus galakkan dalam rangka untuk mendorong atau mendukung makin banyaknya, makin maraknya penggunaan mobil atau sepeda motor listrik di jalanan.

Dan dari sisi lain juga kita memantau pergerakan jumlah pelanggan listrik dalam hal ini listrik PLN yang kian hari kian bertambah dan ini yang mendorong peningkatan konsumsi per kapita juga naik dan sampai terakhir kemarin per triwulan 1 apa yang kita targetkan untuk tahun 2022 ini sebanyak 81.217 ternyata sudah tercapai di triwulan 1 yaitu tercatat ada 82 juta 922 sekian atau 102,1% dari target yang kita tetapkan.

Terus yang lainnya, indikatornya menyangkut TKDN karena ini juga program nasional, izin menyampaikan bahwa sampai triwulan pertama 2022 kita telah mencapai di angka 34,5% dari target 35%, mudah-mudahan sisa triwulan ke depan bisa mencapai target ini semua.

Kemudian karena kita juga sudah meratifikasi *Paris Agreement* kita juga terikat untuk terus menurunkan tingkat emisi CO2 termasuk di dalamnya adalah di sektor pembangkitan dan kita telah berhasil menurunkan 10,30 juta ton dari target 5,36 juta ton. Kita juga dalam rangka untuk mendukung masuknya atau makin meningkatnya penggunaan EBT, termasuk yang sifatnya *intermittent* atau tidak 24 jam maka kemudian penyediaan atau ketersediaan *smart grid* atau transmisi atau jaringan yang pintar itu menjadi sesuatu yang keniscayaan dan ini telah kita selesaikan di 6 lokasi.

Dan di sisi lain juga kita memantau pergerakan investasi secara nasional termasuk di dalamnya di sektor ketenagalistrikan yang sampai di triwulan 3 karena mungkin masih terdampak dengan Covid-19, capaiannya masih relatif minim yaitu 0,7 miliar US dolar, dan selain dalam rangka untuk memantau pelaksanaan efisiensi di PLN sebagai persero, kita juga memantau besaran susut jaringan yang dari tahun ke tahun kita siapkan *roadmap*-nya dan kemudian kita pantau realisasinya secara ketat sehingga PLN mampu melaksanakannya, sehingga efisiensi dicapai lebih maksimum.

Itu indikatornya Bapak/Ibu sekalian dan mohon izin selanjutnya, kami memasuki ke agenda yang kedua yaitu menyangkut realisasi DIPA atau APBN di Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2022. Sebagaimana telah disampaikan

oleh Pak Sekjen, Pak Pimpinan, Ibu/Bapak Anggota Komisi VII yang kami hormati. Untuk tahun 2022, kami dapat amanah untuk melaksanakan 242,4 miliar dan sebagaimana Bapak/Ibu sekalian, bisa cermati di *slide* ini kami kelompokkan berdasarkan per unitnya. Kami punya ada 4 unit Eselon 2, sebelah kiri atas dan di tengahnya adalah dari segi jenisnya, yang kanan adalah peruntukannya itu untuk siapa dan di bawahnya adalah per program dan yang kanan bawah adalah itu berdasarkan skala prioritas.

Untuk diketahui Bapak/Ibu sekalian, untuk kiri atas didominasi oleh 2 sangat kentara dan mohon izin yang hijau sebelah kanannya kurang lebih 97 miliar itu adalah untuk gaji dan pemeliharaan kantor, sementara yang kuning sebelah kirinya itu didominasi oleh program bantuan pasang baru listrik. Sehingga itu 120 miliar di tabel ini dan ini kelihatan dari sisi peruntukannya atau grafik sebelah kanan atas bahwa 120 miliar-nya itu mendominasi hampir 50% dari anggaran yang kami terima amanahnya untuk dilaksanakan di tahun 2022, itu dari sisi pagu anggaran.

Selanjutnya Bapak/Ibu sekalian, mohon izin realisasinya ini dipantau ketat tiap bulan, malah kadang-kadang mingguan oleh Pak Menteri melalui Pak Sekjen. Hingga Mei kemarin, akhir Mei tanggal 31, izin kami melaporkan agak sedikit *miss* ada deviasi yaitu 1,56% meskipun secara *overall* ...*(suara tidak jelas)*... sebagaimana Pak Sekjen tadi sampaikan, kita melebihi target tapi untuk Ditjen Ketenagalistrikan ada sedikit deviasi, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini dikarenakan adanya keterlambatan Bapak/Ibu sekalian, dari pelaksanaan program BPBL dan ini mohon sekali lagi bantuannya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen agar Bapak/Ibu sekalian yang masih belum menyampaikan data dari dapilnya mungkin bisa diserahkan ke kami agar kemudian program ini segera dapat dinikmati manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang membutuhkannya.

Yang berikutnya, ini hanya menunjukkan Bapak/Ibu sekalian bahwa pemantauan penggunaan pemanfaatan APBN kami lakukan sampai ke unit terkecil Pak, ini kita lakukan per unit Eselon 2 sehingga kemudian masing-masing ketat melaksanakannya, melaksanakan amanahnya, sehingga kemudian tidak *miss* dan kita upayakan mencapai target yang telah kita sepakati di akhir tahun kurang lebih 99% dan minimum lebih baik atau sama dengan apa yang kita capai di tahun kemarin tahun 2021.

Itu mengenai agenda kedua, yang terakhir Pak Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota Komisi VII yang kami hormati, adalah menyangkut kegiatan program yang lebih spesifik. Mungkin ini yang lebih menarik yaitu kita kenal dengan BPBL Pak Bambang mohon izin Bapak, ini sesuatu yang menjadi aspirasi dapil Bapak dan ini menjadi tugas kita juga untuk memenuhinya dan untuk tahun ini telah ditetapkan bahwa kita targetkan 80.000 rumah tangga dengan perkiraan anggaran mencapai 120. Meskipun kemudian tadi juga Pak Sekjen telah melaporkan Pak Ketua, 60-nya masih ada di mekanisme *auto blocking* atau *auto adjustment* di teman-teman Kementerian Keuangan. Yang kita lakukan adalah untuk tahap pertama yaitu 60 miliar untuk 40.000 calon penerima bantuan ini, dan kami laporkan hingga tanggal 18 April, kami sudah menerima kurang lebih 44.940 rumah tangga dari 33 Anggota Komisi VII.

Saya senang Bu Andi selalu menjadi motornya, paling komplit, paling depan, paling cepat dan mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Hanya saja sampai saat ini kami masih mencatat baru 33 dari 53, termasuk Bu Ina juga deh, termasuk Bu Ina juga cepat. Dan sampai tanggal 18 Mei lalu Pak Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, dari 44.940 rumah tangga yang telah kita terima dari Bapak/Ibu sekalian dan telah kami ... (*suara tidak jelas*)... ke PLN untuk dilakukan pemadanan atau klarifikasi di lapangan, baru 9.133 yang diselesaikan selama bulan Mei lalu.

Mohon izin, mohon maklumnya karena bulan Mei kemarin adalah libur panjang puasa dan Idul Fitri, maka kemudian proses pemadanan ini agak sedikit terhambat. Sehingga kemudian pemadanan ini akan dilanjutkan untuk sejumlah 35.807 rumah tangga. Ini dengan asumsi pengajuannya atau usulannya baru dari 33 anggota, kalau nambah ya pasti nambah lagi termasuk dari Pak Bambang mungkin Pak. *Monggo* Pak, makin cepat makin baik, makin komplit makin baik karena kami tidak mengambil kebijakan untuk menunggu semuanya selesai, tetapi siapapun yang selesai kami akan proses dan langsung saya mintakan PLN untuk dilaksanakan di lapangan daripada menunggu untuk komplit dulu, saya pikir sesuatu yang agak terlambat, sementara saudara kita menunggunya di sana.

Jadi itu Pak jadi semuanya sudah selesai, dari sisi aturan kami masih menunggu Pak Sekjen tadi berkali-kali menyampaikan permohonannya agar datanya bisa segera, agar kemudian kami bisa eksekusi dengan teman-teman PLN karena dari data yang masuk ke kami pun Pak, selamat pagi Pak Maman. Dari data yang kami masuk pun masih ditemukan di atas ribuan data yang punya NIK ganda Pak, dan itu kan tidak mungkin Pak ada nama yang sama di daftar yang sama untuk kemudian dilaksanakan dan itu mohon izin juga memerlukan proses untuk memilah-milihnya sebelum dieksekusi di lapangan.

Itu menyangkut progres dari program BPBL atau Bantuan Penyambungan Baru Listrik yang mulai 2022 dan saya dibisikin oleh Pak Sekjen, kalau tidak salah melalui Musrebang 2023 program ini disetujui ya Pak, Pak Sekjen ya sehingga kemudian ini akan berlanjut karena kita punya target 197.000 Pak/Bu, yang menjadi target program ini. Sementara tahun ini kita targetkan 80.000 tetapi kemudian baru kita bisa laksanakan 40.000 duluan, sehingga masih ada ruang di tahun berikutnya untuk melaksanakan program ini.

Bapak/Ibu sekalian.

Selanjutnya untuk ke selain program BPBL atau Bantuan Penyambungan Baru Listrik, kami juga punya beberapa kegiatan dengan menggunakan APBN 2022 yaitu dalam rangka untuk memantau 15 indikator kinerja yang telah kami sampaikan di depan. Jadi yang pertama adalah menyangkut bagaimana kita mengendalikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mulai dari pembangkit listrik, jaringan transmisi hingga kemudian distribusi. Yang lainnya kemudian kita juga memantau bagaimana kualitas rasio elektrifikasi dan juga jam nyala di setiap wilayah itu bisa

ditingkatkan, dari misalkan 8 jam hingga 24 jam, itu pun kita menjadi bahan pantauan. Begitu pun dengan program *smart grid* kita bentuk tim khusus untuk membantu agar kemudian hal yang penting ini dalam rangka untuk mendukung pemanfaatan EBT bisa lebih *firm* dan bisa lebih marak lagi.

Kemudian di sisi lain, hal yang juga menjadi perhatian sekarang juga mengenai subsidi dan kompensasi listrik, juga apalagi energi primer mengalami kenaikan, kemudian kita juga secara khusus membentuk tim. Di sisi lain karena ada *electric vehichel* atau kendaraan listrik, maka kemudian unsur keselamatan, baik itu regulasi maupun sosialisasinya kita kemukakan untuk kemudian dibentuk dalam suatu tim dan menggunakan APBN.

Izin lanjut, selain kegiatan prioritas nasional tentu saja kami juga ada kegiatan yang nonprioritas nasional dan kami perlu sampaikan ada di 2 *slide* terakhir Bapak/Ibu sekalian, jumlahnya ada 27 kegiatan, mohon izin saya tidak membaca satu-persatu tapi ini sudah saya dibagikan ke Bapak/Ibu sekalian.

Dan ini yang terakhir sekali adalah *slide* mungkin nomor 13 saja, proses pengadaan Bapak-Ibu sekalian. Di Ditjen Ketenagalistrikan memang sangat minim, yang 1 dan 2 itu sangat sesuatu yang rutin tiap tahun yaitu jasa pengolahan gedung. Ini biasanya menyangkut OB dan seterusnya dan yang kedua adalah kita tidak lagi memilih opsi membeli mesin fotokopi, tetapi menyewanya dan kita lakukan tiap tahun.

Dan yang terakhir sebagaimana yang kami sampaikan adalah proses penugasan, ini tidak dilelang tapi kita tugaskan ke PLN untuk melakukan eksekusi yaitu program sambung baru. Angka pagunya ada di situ, kontraknya juga sudah seperti pagunya tetapi ini belum di eksekusi Bapak/Ibu sekalian, karena baru kemarin kita memberikan surat keputusan kepada PLN siapa-siapa saja yang bisa diberi program ini, bantuan penyambungan baru listriknya ini. Meskipun SK ini baru 8 ribuan tetapi akan ada SK susulan sebagai mengikuti progres pemadanan data yang telah dilakukan oleh PLN di lapangan dan juga kalau sekiranya ada progres usulan baru dari Bapak/Ibu sekalian karena Pak Maman dari 53 atau 52 anggota baru 33 Pak yang masuk dan kami mengambil kebijakan untuk di eksekusi yang mana yang duluan masuk.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak, ini sedikit interaktif Pak mengenai pemasangan ini mumpung Bapak lagi bahas itu.

Intinya ini kan beberapa waktu lalu sempat menjadi isu bahwa list daftar nama-nama itu berdasarkan data DTKS. Sebelumnya saya mohon izin dulu saya ganti sopir dulu, supirnya lagi mohon izin ada panggilan dari Ibu Pertiwi.

Jadi nah itu Pak, terus sekarang Bapak menyampaikan muncul juga usulan dari nama-nama dari teman-teman Komisi VII.

Pertanyaannya yang mau diikuti nanti data yang mana, DTKS atau usulan Komisi VII, kalau misalnya dua-dua, persentasenya seperti apa. Itu aja Pak biar nggak rancu nanti.

Terima kasih.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Baik, Pak Maman bagus sekali itunya, Pak.

Intinya Pak, datanya itu sudah diatur sih di Permennya kalau sekiranya bisa di *share* ada di Pasal 3 kalau nggak salah, Pak. Jadi kombinasi Bapak, jadi karena kita kan tidak tahu siapa di lapangan Pak, maka kemudian yang kita bisa acu adalah DTKS Pak, yang kita yakini bahwa itu menjadi dasar untuk penyaluran bantuan sosial. Meskipun, meskipun kita juga yakini Pak Hendri datanya juga kadang-kadang masih belum *firm* begitu, makanya kemudian Bapak, kita lakukan sebagai daripada kita nugasin PLN untuk dengan kertas kosong atau meminta data dari Bapak dengan kertas kosong, kita paling tidak sebagai acuan DTKS bisa menjadi referensi Bapak/Ibu sekalian untuk mengajukan. Tetapi itu tidak mutlak Pak, yang mutlak adalah hasil pemadanan atau verifikasi di lapangan *which is* Pak Maman sendiri, Pak Sartono sendiri yang mungkin tahu di lapangan seperti apa Pak, tetapi mohon izin Bapak kalau sekiranya dimungkinkan, kami meminta validasi, verifikasi dari kepala desa atau kepala lurah yang saya pikir itu lebih mudah dibandingkan kita meminta *quote unquote* pernyataan dari bupati misalkan Pak. Itu sudah diatur Pak, kemudian manapun Pak bisa sama persis dengan DTKS silakan, sama sekali tidak sama juga silakan Pak. Jadi sangat tergantung kondisi di lapangan Pak Maman, intinya sepanjang saudara kita itu kita pandang layak, sambung Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya kalau Bapak tanya ke saya, sebetulnya rumusnya itu aja Pak, kan kita kan juga sama-sama punya *common sense* ini. Artinya kalau ada rumah yang jelek sekali ataupun rumah di kampung dia belum ada listrik, ya saya pikir itulah yang paling layak gitu, mau dia masuk di DTKS atau enggak masuk di DTKS. Beda kalau misalnya ada ruko baru dibangun, lalu dia belum dipasang listrik, diajukan masuk dalam disini. Saya pikir itu siapa pun juga pasti nggak akan mengizinkan.

Jadi saya rasa itu sebetulnya tolak ukurnya, makanya saya tuh dari mumpung memang rapat ini juga salah satunya saya mau, pas kebetulan Bapak bahas itu.

Terima kasih Pak, lanjut Pak, silakan.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Bisa interaktif ya Pak Maman, atau nunggu dulu nanti.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan dulu.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Saya ingin, izin Pimpinan. Saya ingin memperkuat apa yang sampaikan Pak Maman tadi, Pak Dirjen, jadi kalau kita bicara tentang dulu-dulu data itu kita sudah sampaikan itu, bulan Maret udah rapi, diadakan perapianlah begitu. Tetapi juga yang jadi permasalahan, data yang sudah kita rapikan atas dasar daripada dari desa tersebut ya atau masyarakatnya akan mendapatkan aliran atau program dari pada pasang listrik, pasang baru listrik ini. Itu ialah tidak *linier*, tidak nyambung gitu yang akan dieksekusi oleh PLN begitu, lain begitu. Ini masalah di lapangan ini, jadi ini yang juga harus menjadikan catatan dan saya pikir hampir semua para anggota menghadapi hal tersebut. Ini yang sangat apa harus menjadikan suatu catatan penting, supaya apa yang sudah kita sampaikan dan inikan berdasarkan data di lapangan, jadi kita tidak main-main hal ini gitu dan karena juga menyangkut daerah teritorial kita lah, daerah basis-basis kita yang paham betul kita ini, ini yang menjadi permasalahan itu.

Kedua, pihak PLN tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada penerima bantuan. Ini kan tidak nyambung nih ya komunikasi mampet ini, kalau komunikasi dalam politik *teko muni* dikasih, ini nggak nyala ini kalau tidak ada komunikasi. Ini catatan penting dan juga survei yang dilakukan terkesan dadakan, tidak adanya keterbukaan yang dilakukan kepada masyarakat. Ini harus diketahui oleh kita semua apa kementerian, jadi kami sangat patuh begitu, saya juga tidak biasa komplain begitu, tapi kali ini komplain saya, karena menyangkut kepada masyarakat. Dalam proses pendataan yang telah disepakati di Komisi VII bahwasanya data dari kepala desa dapat digunakan sebagai bentuk rekomendasi. Akan tetapi di lapangan data tersebut tidak sesuai dengan yang diajukan, pendataan yang dilakukan masih perlu dielaborasi.

Jadi ini terlihat kurangnya koordinasi terhadap program ini, sehingga membuat beberapa PLN di kabupaten tidak mengetahui bahwa program bantuan pasang baru listrik telah berjalan karena merasa bukan aspirasi dari Komisi VII. Nah, ini catatan Pak Dirjen, ini yang perlu harus menjadi catatan kita bersama. Dalam 14 di papan Ditjen Ketenagalistrikan terlihat bahwa total pagu 59,9M melebihi program bantuan pasang baru listrik atau *adjustment* BPBL semua pagu 107 miliar menjadi 50 titik-titik ya. Nah, ini harusnya ngotot ini sudah sampai, jangan sampai dipotong lah, ini juga perlu disampaikan secara detail gitu, hal ini mengapa sampai terjadi.

Sementara di situ dulu Pimpinan, Pak Maman bahwa ini menyangkut daerah gitu ya yang harus menjadi *concern*, tidak hanya indah saja di paparan gitu tapi realitasnya *njelimet* gitu ya tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Ini

kita patuh ngikutin, data-data juga komplit, verifikasi, kita sampaikan mulai bulan Maret. Jadi ini menjadi catatan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Sartono.

Silakan Pak.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak Sartono atas masukannya Bapak.

Mohon izin melaporkan untuk Pak Sartono dan Bapak/Ibu sekalian, program kita nih belum di eksekusi Pak, belum adapun yang dipasang melalui program ini. Kalaupun Bapak melihat di lapangan sudah ada pemasangan bantuan gratis, itu CSR-nya PLN, Pak. Ini tidak ada hubungannya dengan data kita, data kita belum di eksekusi Pak, baru kemarin kami sampaikan ke PLN dan itu harus Pak, harus sesuai dengan aspirasi Bapak/Ibu sekalian.

Perkara sekarang yang di eksekusi di lapangan oleh PLN itu berbeda mungkin Bapak sempet ngecek, itu bukan program kita Pak, program sejenis tetapi melalui CSR PLN. Nah, ini yang menjadi bahan kita untuk dikoordinasikan karena ini menyangkut masyarakat yang kita layani hampir sama, takutnya apa yang mereka sudah eksekusi itu menyangkut ada di situ. Tapi sekali lagi Pak, *point*-nya kan melayani masyarakat ya Pak, nggak kemudian gontok-gontokan harusnya saya yang mengeksekusi atau PLN yang mengeksekusi, yang penting kita jangan sampai ada dua kali data yang kemudian kita eksekusi dengan dua program yang berbeda, satu melalui ruangan ini, satu melalui CSR-nya. Kami juga kaget Pak, terus terang Pak karena kemarin PLN itu, tahun lalu memang mereka sudah melakukannya Pak Maman, di Bogor seingat saya, Bapak Presiden malah yang membukanya. Tetapi dalam hal pertukaran data Pak karena mereka juga sekarang kan sedang memverifikasi 44.000 usulan kita bersama, tetapi saya belum dilaporkan oleh mereka mana yang kemudian dari 44.000, adakah mereka yang sudah tereksekusi melalui CSR-nya. Tapi program kita Pak, belum di eksekusi sama sekali. Saya yakin karena baru kemarin Pak, baru kemarin, sementara SK-nya itu baru kemarin, mereka baru kemudian lakukan pengadaan, maksudnya melakukan pelelangan, baru kemudian di eksekusi, mungkin 2 bulan lagi. Tapi targetnya kenapa saya paksa kemarin luncurkan, agar program ini ada 1 atau 2 rumah atau 100-200 rumah lah per tanggal 17 Pak Maman ada yang nyala Pak, dari program ini kemudian gaungnya agak sedikit *quote unquote* heroik seperti itu, gitu Pak.

Tapi terima kasih Pak masukannya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, di-copy Pak.

Silahkan, Pak.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Bapak itu aja Pak dari kami, Pak.

Dari yang terakhir itu yang program eksekusi yang mungkin sebelumnya deh, yang tabel, nah ini aja Pak jadi mohon yang di bawah nomor 3 itu, kami laporkan kami baru menyampaikan SK penetapan. Tetapi kami juga sekali lagi Pak Pimpinan Pak Maman, kami masih menunggu Pak datanya, sekompitnya karena kami khawatir datanya takut, satu *double* NIK yang kemarin kami sortir, takutnya sama dengan program CSR Pak, hingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk saudara kita yang mungkin tidak di eksekusi oleh PLN dan tidak juga di eksekusi oleh melalui program ini.

Saya pikir itu Pak, saya kembalikan ke Pimpinan.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Saya nambahin satu Pimpinan, hal ini temuan di lapangan gitu supaya akhirnya kalau kita dilaporin kan meledak juga itu Pak karena tidak komunikasi tadi. Jadi harus disampaikan juga bahwa ada program CSR begitu, kalau hal ini saya juga ini, waduh ini kan kayak main-main begitu setelah dapet laporan dari lapangan. Tapi setelah dapat keterangan dari Dirjen kan kita mengetahui bahwa betul ada program, PLN juga ada program untuk itu. Nah, ini yang kita harus tanyakan juga ke PLN ini Pimpinan, kalau mau ada program di daerah kasih tahu kita ini, jangan sendiri-sendiri atau kampanye BUMN sendiri untuk sosialisasi nyapres sendiri, ini ngeri-ngerri kacau kalau begini. Catatan ini Pimpinan, jadi jangan liarlah begitu.

Terima kasih.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.SC.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, sebentar, Bu, saya mau nanya Pak. Dari total anggaran kita yang dialokasikan untuk bantuan pasang listriknya berapa Pak, totalnya.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

120 miliar Bapak, 60 diantaranya masih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pertanyaan saya, apakah 120 miliar itu bisa meng-cover kalau dari total data DTKS itu, budget 120 miliar tuh bisa menyelesaikan keseluruhan nggak?

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Belum Pak, target kita ini 157.000, ini baru 80.000.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

157.000 yang target ya, berarti yang membawa pasal sekarang baru teralokasi 80.000. Lalu PLN alokasikan lagi dana CSR-nya, ini saya bilang Republik ini kok kayak demen banget buang-buang duit gitu, jadi *double-double* kayak begini di tengah kondisi kita lagi susah, anggaran kayak begini, susah *budget* ya. Tapi nggak apa-apa ini menjadi catatan juga nanti bakal kita, kita kan coba panggil juga PLN. Jadi kalau bisa disinergiskan kenapa jadi harus kayak saing-saingan gitu.

Makanya saya selalu bilang sekarang itu sudah ada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, sama Kementerian PLN, ada lagi Kementerian Pertamina, jadi lucu-lucu gitu loh. Jadi korporasi kita ini udah keren kali, jadi udah pengen menyaingi kementerianlah begitulah kurang lebih. Jadi makanya ini menjadi catatan kita, ini bagus sekali ini informasinya nanti kita akan agendakan untuk coba minta penjelasan dari Pertamina terkait program-program yang mengena ke masyarakat, jangan sampai jadi tumpang tindih, akhirnya jadi kalau kata orang Sunda itu *babaliut, babaliut* itulah kurang lebih.

Ya, Bu, silakan Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.SC.):

Jadi begini Pak, kalau izin Pak Ketua. Ini Pak Ketua kita harus berjuang karena ternyata 80.000 itu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bukan hanya Pak Ketua yang berjuang Bu, kita Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Ya, 80.000 ternyata ada yang di bintang Pak, ini mungkin harus disampaikan bagaimana progresnya untuk melepas bintang itu. Kedua, Pak Dirjen, ini saya kalau di salah satu staf dari Direktorat Jenderal Migas yang dulu ketika dia NIK-nya ganda, KK-nya ganda misalnya untuk nelayan atau nelayan itu dia akan info ke saya, mungkin kita salah *input*. Akhirnya kita cek, kita datang rumah, ini nggak ada, NIK ganda itu ada di mana yang dimaksud, siapa yang NIK-nya ganda. Makanya saya katakan kepada staf Bapak, kasih pink semua itu data ke saya yang NIK-nya ganda, saya datangin gitu loh rumahnya.

Kedua, yang sudah oke itu siapa, di mana, kan ada kabupatennya banyak, kita jadi jangan jadi kita jadi di-bully oleh konstituen. Saya kasih waktu Pak, harusnya data itu dibawa untuk masing-masing anggota yang NIK-nya ganda itu yang mana aja, dikasih pink. Kemudian yang sudah oke tuh kasih hijau, jadi kita tahu di mana yang mau dipasang, ini nggak tahu, belajar dari salah satu staf Ditjen Migas komunikasi selama 2 tahun kasih tahu Bu Andi, ini NIK-nya ganda, ini KK-nya ganda, terus kita cek, oh ternyata salah input yang di bawah, jadi kita datengin rumahnya. Kita pro aktif kok walaupun, ya tolong ya Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya itu menjadi salah satu catatan-catatan Pak ya saya pikir, saya rasa sih dinamika ini sah-sah dan wajar-wajar aja. Ini baru pertama kali kan, tinggal yang dibutuhkan itu adalah kecepatan respon temen-temen dari Dirjen Gatrik dalam menyikapi setiap problem yang ada di bawah.

Pada dasarnya saya menganggap bahwa terkait program ini Dirjen Gatrik kan serius untuk merealisasikan dan melibatkan teman-teman Komisi VII, tinggal kan sekarang sinkronisasi dan akselerasi serta *responsibility*-nya aja lah.

Saya pikir itu ya, cukup ya, ada lagi? Oke, jadi Kesekjenan udah Pak ya, Ditjen Gatrik udah, selanjutnya.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

EBT Pak, izin, Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

EBT ya, ini energi baru terbarukan. Ini saya mau jadi catatan juga Pak, kemarin kita udah panggil Sorik Merapi ini sebelum nanti Bapak jelaskan dan itu rekomendasi Komisi VII untuk mencabut izinnya Pak, karena ternyata di awalnya kita pikir yang pertama itu kecelakaan Pak, 6 orang aja korbannya korban kecelakaan. Ternyata kejadian yang pertama itu 6 orang meninggal,

selanjutnya ada kejadian yang kedua, ketiga, *fatality* terakhir yang keempat dan kita melihat ada 2 Pak, ini ada Pak Sekjen juga. Ada dua sebetulnya evaluasi kita, evaluasi yang pertama adalah manajemen standar *safety*-nya yang memang tidak dijalankan.

Namun yang kedua Pak, yang mungkin tak kalah jauh lebih penting, pengawasan pembuatan program yang dilakukan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita lagi kaji Pak di internal, kemungkinan besar geothermal itu akan kita tarik ke SKK Migas Pak, mumpung kita lagi mau bahas RUU EBTKE dengan RUU Migas, karena kami kasihan, karena secara standarisasi operasional sebetulnya itu hampir sama sebetulnya dengan aplikasi di migas. Jadi kami kasihan Bapak-bapak di Dirjen Energi Baru Terbarukan kecenderungannya banyak dibohongin sama teman-teman pelaku-pelaku perusahaan-perusahaan geothermal itu. Akhirnya pengawasan dan lain sebagainya enggak jalan, kurang lebih seperti itu nanti wacananya Pak, jadi mumpung kita lagi mau bahas RUU EBTKE dan RUU Migas.

Jadi ada kemungkinan kita akan masukkan itu di dalam RUU Migas dan atau RUU EBTKE dan tupoksinya kita tarik ke SKK Migas saja, biar pengawasan sekalian, kan di sana kan ada definisi pemboran. Jadi biar mereka sekalian langsung mengawasi dan buat, jadi *drilling plan* dan lain sebagainya itu ya disana teknisnya. Bayangkan Bapak nggak ada sejarahnya orang ngebor nggak pakai *diverter* Pak, nggak ada, ini baru di Sorik Merapi ini Pak. Ada kejadian *blowout* terus nggak ada sejarahnya orang ngebor itu nggak pakai *sensor polisine*, nabrak, jadi saya pikir itu Pak sebagai catatan saja Pak, sebagai informasi ke Bapak.

Terima kasih. Silakan Pak.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA) :

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII juga Bapak/Ibu dari Kementerian ESDM.

Melanjutkan Pak Pimpinan, untuk yang dari Ditjen EBTKE, terima kasih dan saya juga mohon maaf di RDP kemarin tidak bisa hadir karena mendampingi Pak Menteri dan sudah berada di sana, sudah berada di luar, jadi tidak mungkin lagi melakukan penyesuaian. Kami akan melaporkan progres terkini dari, pertama adalah saya akan awali dengan sedikit tentang kinerja. Kemudian nanti terkait dengan pengelolaan anggaran DIPA 2022 dan juga progres 2021 karena ada beberapa yang memang sifatnya *multiyears* karena ada beberapa kegiatan yang terkena *refocusing*. *Next*.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Terkait dengan kinerja, kinerja besar, kinerja makro untuk EBT karena memang sekarang menjadi *mainstream* di manapun gitu ya, bahwa EBT harus berada paling depan dan kita sebetulnya dari sisi realisasi ini banyak terseok-seok, dari sisi implementasi banyak-banyak tantangan saya kira di sana, tapi di satu sisi karena banyak tantangan, menurut saya peluangnya juga sama, sama-sama menarik di situ.

Target 2022 dari sisi bauran EBT sebetulnya targetnya 15,7. Kami di akhir 2021 realisasinya adalah 12,16 sehingga kita tahun ini seharusnya naiknya harus 3%, tapi dari angka kalkulasi yang kami lakukan tidak mungkin kita akan mencapai angka 15,07% untuk 2022. Ini angkanya adalah di *generate* dari rencana umum energi nasional.

Kemudian yang menjadi indikator utama salah satunya adalah tambahan kapasitas pembangkit listrik karena ini yang bisa ditunjukkan bahwa pemanfaatan EBT yang berkelanjutan adanya di sini dan umumnya ini sifatnya adalah *on grid* dengan PLN. Kami sampai terakhir Mei baru mencapai 66 megawatt dari target 647,8 megawatt di 2022. Jadi per angka ini persentase baru 10% kita berjalan ke sana.

Kemudian untuk implementasi bahan bakar nabati atau dikenal dengan kebijakan B30 dan ini biodiesel 30% di dalam campuran seluruh jenis solar yang dipergunakan di Indonesia, target di 2022 adalah 10,1 juta kilo liter, ini kira-kira ekuivalen dengan 30% pemanfaatan bahan bakar jenis diesel di dalam negeri. Perjalanannya cukup baik, jadi dari sisi realisasi ini masih sesuai dengan target, masih sesuai dengan *on track* jadi angkanya 37% sampai dengan akhir Mei 2022.

Kaitannya dengan PNBP subsektor EBT, jadi meskipun ini masih terus di jalan pengembangan tapi untuk, khusus untuk panas bumi bahwa terjadi PNBP yang setiap tahun jumlahnya ini selalu di atas 100% sebetulnya capaiannya. Kami target untuk 2022 sebesar 1,5 triliun dan sampai dengan akhir Mei ini angkanya sudah 20% capaiannya atau ekuivalen dengan 309 miliar yang sudah disetorkan ke rekening negara.

Kemudian dalam kaitannya dengan investasi, sampai akhir Mei dari target hampir 4 miliar US dolar di 2022, kami mengasumsikan dulu bahwa 4 miliar ini basisnya nanti akan, pertama dalam Perpres tentang EBT tentang tarif ini bisa keluar di awal tahun, juga kebijakan PLTS atap bisa *smooth* untuk berjalan. Pada perjalanannya memang sekarang Perpres untuk tarif EBT sekarang sedang dalam proses paraf di para menteri yang terkait, sehingga dari sisi realisasi sekarang baru di angka 14% atau 0,58 miliar dolar.

Kemudian dari sisi realisasi anggaran nanti kami akan sampaikan secara lebih detail, kami masih sesuai dengan kurva S kami di angka 27,1% dengan target hampir 100% di 2022. Kami memulai kegiatan-kegiatan yang lain dengan upaya untuk mempercepat pemanfaatan EBT, salah satunya adalah program *co-filing*, jadi ini mencampur biomassa, mencampur energi terbarukan di dalam PLTU. Tahun ini, 31 lokasi PLTU sudah dicampur dengan biomassa dengan target 340 giga watt *hour* akan dihasilkan listriknya dari biomassa.

Sekarang capaiannya di bulan Mei adalah 185 megawatt atau kira-kira ini ekuivalen dengan 60 megawatt pembangkit listrik yang beroperasi selama 24 jam terus-menerus dengan biomassa atau dengan energi baru terbarukan.

Kemudian kaitannya dengan penurunan emisi gas rumah kaca karena Dirjen EBTKE menjadi salah satu koordinator untuk pemantauan kegiatan ini bersama dengan Setjen dari sisi pencatatan. Tahun 2022 targetnya adalah 78 juta dan tahun kemarin angkanya sudah 70 juta capaian kami, ini akan terus menambah sejalan dengan penambahan dari penggunaan energi terbarukan. Jadi kalau penggunaan energi terbarukannya tidak nambah, target penurunan emisinya pun akan stagnan di angka-angka yang telah berjalan selama ini.

Kemudian terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri untuk infrastruktur APBN, target di 2022 adalah 210,2 miliar jadi ini kira-kira ekuivalen dengan hampir separuh dari anggaran infrastruktur yang ada di Ditjen EBTKE dan sekarang karena programnya baru berjalan, angkanya masih sangat kecil baru 10,85 tapi 210 ini adalah angka-angka yang sudah terkontrak, sehingga secara perencanaan ini akan tercapai nanti di akhir tahun.

Kemudian kalau terkait dengan postur anggaran di Ditjen EBTKE, sebagaimana format yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen Listrik. Anggaran untuk 2022 adalah 671,7 miliar dan 92% dari anggaran ini atau 92,7% dari anggaran yang ada di kami, ini digunakan untuk belanja barang, dan belanja barang ini fokusnya adalah kepada kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan untuk masyarakat langsung.

Untuk keperluan pegawai, angkanya adalah 7,3% atau hampir 49 miliar dan kami hampir tidak ada kegiatan penambahan modal di kantor, kecuali sebesar 0,3 miliar ini untuk melengkapi peralatan kantor kami dan apabila dilihat dari pembagian per Eselon 2. Jadi di sini secara umum rata-rata kira-kira angkanya 6 sampai atau 9 miliar untuk per eselon 2 yang mempunyai portofolio. Jadi untuk Direktorat Bioenergi, Direktorat Aneka EBT, Direktorat Konservasi dan Direktorat Panas Bumi ini kira-kira semuanya seragam, angkanya di 9 miliar, kemudian Sesditjen karena ini mengelola anggaran manajemen dan pengelolaan internal termasuk gaji memang angkanya paling besar kalau di luar anggaran untuk keperluan infrastruktur. Jadi 79,3% anggaran yang ada di Ditjen EBTKE ini dikelola oleh Direktorat Rembang Infrastruktur EBTKE yang tugas utamanya adalah melakukan pembangunan publik fisik ya, yang sebagian besar adalah melakukan dengan sinergi dengan Anggota Komisi VII DPR.

Kemudian kalau dari sisi realisasi tadi kami sudah sampaikan bahwa angkanya 27% ya untuk akhir Mei 2022 sedikit lebih rendah dari target kami, jadi kalau target adalah 27,22% dan sekarang capaiannya baru 27,10% jadi deviasi 0,12% dari target tapi *Insyah* Allah ini masih sesuai dengan rencana kami untuk mencapai angka 99% di 2022 di akhir tahun. Bila kita lihat secara lebih detail perjalanan dari bulan ke bulan Ibu/Bapak Pimpinan yang kami hormati disini, bahwa di akhir tahun target kami adalah 99,67% dan sekarang kalau dilihat capaian per 31 Mei memang angka-angkanya masih beberapa ada yang melewati target, beberapa ada yang masih di bawah tapi secara umum

angkanya masih sesuai dengan *roadmap*, kami termasuk juga yang kaitannya dengan belanja pegawai. Saya kira kalau belanja pegawai *linier* ya mengikuti bulan karena sifatnya adalah lebih banyak gaji dan tunjangan, belanja barang ini lebih banyak nanti akan di *support* atau berasal dari realisasi dari kegiatan pembangunan publik fisik yang per sekarang angkanya sudah 26%, kemudian belanja modal yang 0,3 miliar ini sudah hampir selesai kegiatannya.

Kemudian dari sisi pengadaan, kami laporkan di sini bahwa dari 503,36 miliar kegiatan publik fisik yang ada di Ditjen EBTKE, terdiri dari 23 paket. Di mana 8 pakatnya adalah merupakan kegiatan lanjutan di 2 hari 2021 senilai 101,44 miliar, bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan dari PJU-TS di wilayah 1 dan 2, termasuk kegiatan *move*-nya. Kemudian 2 paket kegiatan Apdal di wilayah 1 dan 2 termasuk juga kegiatan *monitoring* dan evaluasinya, jadi ini berlanjut tidak ada kontrak baru untuk hal ini. Kemudian sebesar 401,9 miliar atau terdiri dari 15 paket, 13 paket ini sudah berkontrak, sudah berjalan dan 2 paket ini belum tender. Mengapa ini belum tender? Karena ini memang anggarannya masih diblokir masuk di dalam seperti yang Pak Sekjen sampaikan tadi, masuk kriteria *automatic adjustment*. Jadi 1 kegiatan PLTS atap dan 1 kegiatan pendukungnya atau *monitoring* dan evaluasinya.

Jadi secara umum, *next* apabila dilihat dari jenis kegiatan, jenis kegiatan dari 532,5 miliar tadi bahwa kegiatan fisiknya adalah revitalisasi PLTS 6 unit, kemudian PJU-TS melanjutkan PJU-TS untuk tahun kedua ini sebesar 1.454. Kemudian PJU-TS untuk 2022 khusus sebesar 20.546, sehingga PJU-TS totalnya adalah 22.000, kemudian PLTS atap 108 unit yang sekarang berjalan adalah untuk 79 unit, kemudian Apdal melanjutkan kegiatan di 2021 tahun ini 11.347 unit dan PLTMH di 3 lokasi. Semuanya sudah berjalan, sudah berkontrak dan kami melakukan kerjasama tidak hanya dengan Komisi VII tapi untuk persiapan lapangannya, misalkan PLTMH kami juga bekerja sama dengan bupati setempat.

Kemudian kami laporkan juga Bapak Pimpinan, kegiatan di 2021 karena sifatnya ini *multiyear* ya jadi ada kegiatan yang dibawa dari 2021, *next* untuk kegiatan PJU-TS, khususnya yang di wilayah 1 dan wilayah 3. Untuk wilayah 2 ini bisa diselesaikan di 2021 semua, jadi tidak ada, tidak masuk ke kriteria *multiyear*.

Secara keseluruhan kami sampaikan disini bahwa 99,1% sudah selesai Pak untuk yang 2021, jadi sekarang masih menyelesaikan 202 unit atau 0,92% di beberapa wilayah atau di beberapa daerah yang ada Anggota Komisi VII di situ.

Jadi kalau kembali kami sampaikan untuk masing-masing kegiatan di direktorat, pertama kegiatan di Direktorat Infrastruktur, untuk kegiatan layanan publik fisik EBTKE. Jadi kami di tahun ini 6 unit revitalisasi senilai 24,6 miliar, kegiatan ini telah berkontrak dan sekarang dalam tahap pembersihan lahan dan pengadaan material. Jadi realisasi keuangannya ini sudah dilakukan dalam bentuk uang muka.

Kemudian untuk kegiatan PJUTS *multiyears* kontrak untuk 2021 sebanyak 20.546, kemudian 2022 sebanyak 1.454 unit atau senilai 19,7 miliar.

Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan pembangunan sebanyak yang tadi saya sampaikan, dengan realisasi keuangan 85,22%, sehingga sisa sebesar 45,6 miliar. Ini yang kami juga mohon dukungan untuk recomposisi anggaran karena sekarang sebetulnya angka 45,6 miliar ini belum ada anggarannya, Pak. Jadi belum ada anggarannya karena untuk kegiatan yang basis DIPA 2022 kita tidak sempat memasukkan angka yang lunturnya 45,6 miliar ini, kami sedang berkomunikasi dengan Pak Sekjen untuk menyelesaikan masalah ini.

Kemudian untuk PJUTS 2022 kegiatan telah berkontrak dan tahap proses produksi, komponen dan survei lokasi sudah dilakukan di beberapa tempat, realisasi keuangan dalam bentuk uang muka juga sedang berjalan. Demikian juga untuk PLTS atap untuk 79 unit telah berkontrak dalam proses produksi komponen dan survei lokasi.

Apdal, ini merupakan kegiatan lanjutan jadi sekarang sedang terus berjalan, dengan realisasi keuangan hampir 20%. Untuk kegiatan pembangunan PLTMH di 3 lokasi sebanyak 3 unit dengan total 23,8 miliar telah berkontrak dan sudah mulai masuk ke dalam proses pembangunan, sudah dilakukan apa semacam *groundbreaking* kecil di lapangan untuk memastikan bahwa lahannya siap. Kemudian kegiatan pendukung adalah konsultan untuk pengawas pembangunan dan juga untuk layanan dukungan operasional.

Kemudian untuk Direktorat Panas Bumi, ada berapa kegiatan layanan yang dilakukan:

1. Layanan kegiatan penyiapan program terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran 1,4 miliar. Progresnya sudah 56,4% dengan nilai realisasi keuangan kira-kira di jumlah yang sama.
2. Layanan pembinaan dan bimbingan usaha, ini umumnya yang memastikan PNBP bisa berjalan dengan lancar.
3. Layanan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi terdiri dari 3 kegiatan 2,7 miliar.
4. Layanan kerja sama dan investasi.
5. Layanan keteknikan dan lingkungan, terdiri dari dua kegiatan.

Ini yang 2 kegiatan 1,86 miliar yang salah satunya adalah melakukan pengawasan seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan untuk kegiatan-kegiatan keteknikan di lapangan. Jadi memang dari sisi anggaran juga tidak terlalu besar 2 kegiatan 1,8 miliar, kita melakukan pengawasan keteknikan, keselamatan dan lingkungan untuk seluruh wilayah yang ada pengelolaan panas buminya.

Kemudian yang terkait dengan di Direktorat Aneka EBT, secara umum karena bisnisnya mirip, jadi kami di sini melakukan kira-kira penyeragaman ya. Jadi ada layanan penyiapan program 4 kegiatan, kemudian layanan pembinaan, pengawasan dan bimbingan usaha ada 2 kegiatan 2,7 miliar. Kemudian layanan implementasi pengembangan 2 kegiatan dan ini sudah berjalan 28%. Layanan kerja sama dan investasi dan terakhir adalah layanan keteknikan dan lingkungan. Jadi semuanya ini mirip-mirip, demikian juga yang ada di bioenergi. Jadi ada layanan penyiapan program ini biasanya kira-kira tugasnya itu adalah melakukan perencanaan program, target-target untuk tahun depan, memastikan pembangkit mana yang akan masuk, pembangkit mana yang akan diusulkan ke PLN untuk masuk di dalam RUPTL.

Kemudian layanan pembinaan, pengawasan dan bimbingan usaha terdiri dari 2 kegiatan sudah berjalan 43%. Kemudian layanan kerjasama dan investasi, layanan keteknikan dan lingkungan. Jadi itu yang dari Direktorat EBT.

Kemudian yang terakhir adalah Direktorat Konservasi Energi, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang kami kelompokkan sebagai penyiapan program. Kemudian layanan pengawasan, kemudian layanan bimbingan teknis dan kerjasama karena kalau dari sisi konservasi, perubahan perilaku, peningkatan kesadaran masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan penghematan energi.

Berikutnya adalah layanan pengembangan usaha 0,7 miliar, yang terakhir adalah layanan penerapan teknologi sebesar 1,66 miliar dan ini progresnya sudah kira-kira mirip sesuai dengan pewaktuan 33% dengan realisasi keuangan di angka 32%.

Terakhir Pak Pimpinan yang kami laporkan di sini adalah program dukungan manajemen, gaji dan tunjangan, kemudian operasi dan pemeliharaan kantor. Saya kira ini kegiatan-kegiatan rutin yang ada di kantor, kemudian layanan perencanaan dan *monitoring* evaluasi yang sifatnya untuk pelaporan, layanan sumber daya manusia kami juga melakukan upaya-upaya peningkatan indeks profesionalisme dari ASN.

Layanan organisasi dan tata laksana sebesar 1,2 miliar, layanan keuangan, kemudian layanan hukum ada dua kegiatan terutama yang pertama adalah untuk menyelesaikan Perpres dan kedua bersama-sama dengan Komisi VII DPR untuk RUU EBT.

Kemudian layanan manajemen internal Sesditjen, layanan humas meskipun tidak terlalu besar, kami men-*support* adalah kegiatan humas yang ada di Setjen. Layanan data dan teknologi informasi untuk memastikan bahwa semua sistem, baik itu sistem perkantoran maupun untuk sistem investasi, pengawasan ini bisa berjalan sebagaimana yang sudah disusun di tingkat kementerian. Yang terakhir adalah layanan prasarana internal sebesar 0,3% dan ini sudah hampir selesai kita laksanakan.

Itu yang kami sampaikan untuk lampirannya, data satuan tiganya sudah kami lampirkan dan sudah kami gandakan Pak Pimpinan, sudah disampaikan jadi mohon izin tidak, saya tidak menyampaikan satu-persatu untuk satuan 3 sebagaimana juga tadi Pak Sekjen dan Pak Dirjen.

Demikian, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang mau respon dulu sebelum kita masuk atau selesaikan saja dulu ya, *siji maning*. Pak kalau melihat formasi kayak begini Pak, ini kita pastikan Pak permainan panjang kayaknya, tenang kita kasih lapangan ini umpamanya, kita serahkan kepada yang berwajib.

Selanjutnya, silakan Kepala BPSDM.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN ESDM RI (PRAHORO YULIJANTO NURTJAHYO, P. HD.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI. Kemudian teman-teman dari Kementerian ESDM yang hadir pada kesempatan kita hari ini.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan, ada 3 hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Jadi yang pertama, untuk mengingatkan kembali tentang postur anggaran yang kemarin tahun 2022 seperti apa, kemudian nanti berkaitan dengan serapan anggaran dari postur ini, kemudian yang ketiga terkait dengan hasil kerja selama tahun 2022 sampai dengan Mei. Jadi kalau kita melihat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkait dengan postur anggaran seperti kita lihat di sini hampir total semuanya adalah 561M, hampir 60% ini di *support* oleh APBN sementara sekitar 40% ini *support* dari BLU. Jadi ini apa yang harus kami cari sendiri uangnya untuk men-*support* kegiatan kami.

Kegiatan kami yang ada di sini kita ada 8 satker yang ada di sini, total semuanya yang perlu kita *highlight* di tahun 2022 ini adalah total anggaran pendidikan untuk tahun 2022 sebesar 117 miliar, ini *represent* dari 20% dari total anggaran APBN secara nasional.

Slide berikutnya, kalau tadi adalah postur anggaran di tahun 2022, ini adalah serapan anggaran untuk tahun 2022. Secara *overall*, kita melihat capaian kita melebihi dari target untuk tahun, paling nggak untuk bulan Mei ini. Jadi realisasi anggaran kita sampai dengan Mei 2022 sebesar 166,27 miliar atau 29,62% dari total anggaran, dengan deviasi positif sebesar 14,9 miliar. Hasil ini merupakan implementasi dari masing-masing satker kalau kita lihat ada beberapa satker yang melebihi. Namun, kita juga melihat masih ada juga satker yang kurang, sehingga secara keseluruhan *overall* kita bisa melebihi dari total semuanya.

Dari pembagian berikutnya, ini dari sisi ketika kita, dari jenis belanja. Jadi ada belanja pegawai, barang dan modal kalau kita melihat barang dan modal ini *combine* Pak jadi ini termasuk juga BLU di sana seperti kita tahu karena *source* kita ada 2, satu dari APBN dan satu dari kementerian sisanya dari BLU.

Kemudian kalau kita melihat juga dari belanja barang ini adalah termasuk di sana belanja operasional, kemudian juga belanja pelayanan lokasi baik yang RM maupun yang BLU. Total kalau kita melihat yang ada di sini dari target yang ada, yang seharusnya 27,09 realisasi sampai dengan akhir Mei kita mencapai 29,62%.

Dua *slide* yang tadi pertama, itu terkait dengan masalah postur dan serapan, kita masuki terkait dengan pencapaian kita. Jadi sampai kinerja dengan Mei 2022 ini gambaran terkait dengan program, salah satu program kita yang masih menjadi prioritas nasional ini debat masyarakat. Jadi dari target 1.850 sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Mei 2022 kita bisa mencapai 990.

Ini ada beberapa catatan yang di sini salah satu contoh kegiatan adalah pelatihan petugas penanganan bahaya gas oleh teman-teman di BPSDM Migas di Cepu. Kemudian juga diklat sertifikat masyarakat, instalasi, pemanfaatan tenaga listrik ini temen-temen di EBTKE Ciracas. Kemudian juga pelatihan pengeboran dan peledakan tambang bawah tanah oleh PDTPD di Sawahlunto, kemudian juga pemandu wisata di Provinsi Bangka dan Belitung oleh temen-temen di BPSDM Minerba.

Kalau kita melihat sebarannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di slide berikutnya kita bisa melihat dari 990 yang ada yang saat ini, ini adalah sebaran dari teman-teman yang sudah melakukan diklat masyarakat over dari seluruh dari Sabang sampai Merauke, jadi ini sebaran yang ada ya. Ini masih sekitar 880 lagi yang masih belum dilakukan yang akan kita laksanakan mulai dari Juni sampai dengan Desember tahun 2022.

Kemudian berikutnya, ini terkait dengan kinerja untuk pengembangan sumber daya manusia di internal Kementerian ESDM. Target di akhir tahun angka kita adalah 81,56, seperti kita ketahui ini adalah salah satu parameter yang dipakai untuk meningkatkan IP (Indeks Professional) ASN yang ada di tempat kami. Jadi kalau kita melihat ini capaian kita masih 76,92 ini angka ini salah satunya ini merupakan salah satu program kami dari BPSDM yang harus kita mengantisipasi, terutama adanya transformasi jabatan yang sebelumnya dari struktural ke fungsional dan ini menjadi salah satu PR yang harus kami selesaikan juga di tahun ini. Kemudian juga ada beberapa teman yang sebelumnya ada di Balitbang yang harus kita sudah siapkan juga persiapannya terkait dengan diklat fungsional mereka.

Kemudian *slide* berikutnya, ini terkait dengan pengembangan SDM di sektor ESDM, khususnya untuk diklat sertifikasi sampai dengan Mei tahun 2022. Ini piyurli kegiatan yang di-*support* oleh BLU, jadi kalau kita melihat ini ada 2 pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan industri dan yang kedua adalah sertifikasi kompetensi.

Di tahun 2022 ini kita membuat target, atau target ini berdasarkan dari RPJMN, targetnya adalah 15.500 untuk pelatihan industri, kemudian untuk sertifikasi kompetensi 20.100 orang atau kompetensi sertifikasi. Sampai

dengan Mei tahun 2022 dari target yang ada, kita sudah mencapai 8.144 untuk pelatihan di industri dan 8.126 untuk pelatihan atau sifatnya sertifikasi untuk kompetensi.

Poin selanjutnya berkaitan dengan pengembangan ESDM untuk pendidikan vokasi, Kementerian ESDM mengayomi 2 politeknik. Yang satu politeknik yang fokus ke arah migas, SKK Migas ada di Cepu. Kemudian Politeknik Energi dan Pertambangan yang ada di Bandung. Slide selanjutnya Bu, total *student body* yang ada, total semuanya adalah 1.252 kombinasi dari 1000, sekitar 1000 orang ada di PEM Akamigas Cepu, kemudian 250 ada di PP Bandung. Di PEM Akamigas kita mempunyai 5 prodi, kemudian di PP Bandung kita punya 3 prodi.

Sampai dengan Mei 2022 kalau kita bisa melihat profil dari lulusan yang ada di tempat kita, *next* selanjutnya, ini adalah profil dari lulusan yang ada di PEM Akamigas. Jadi karena PIP baru tahun ini adalah tahun pertama untuk memberikan kelulusan, ini saat ini belum kita bisa, belum melaporkan tapi kalau kita lihat di PEM Akamigas capaian untuk tahun 2020 dan 2021 ini seperti yang terlampir. Jadi dari 217 lulusan tahun 2020 yang diterima bekerja 141 orang atau sekitar 65% kurang lebih. Dan kemudian ini masa tunggu yang sudah bekerja, mereka sudah diterima setelah lulus kurang dari 6 bulan setelah lulus adalah sekitar 83 orang, kemudian yang lebih dari 6 bulan sekitar 58.

Sekali lagi ini 2 tahun ini kalau kita melihat ini dampak dari Covid-19 sangat terasa bagi lulusan-lulusan produk kami, salah satunya terlihatnya di tahun 2021 dari 274 orang lulusan yang baru diterima 63 orang dan ini *represent* dari yang kurang dari 6 bulan 58 orang, yang lebih dari 6 bulan sekitar 5 orang. Sebaran lulusannya kita bisa melihat disini mulai dari industri hulu migas, geothermal kemudian di industri hilir migas, petrokem, kemudian industri penunjang migas sampai dengan lembaga institusi pemerintahan atau lembaga Pemda.

Kemudian *slide* saya yang terakhir, ini adalah kinerja dari penerimaan BLU BPSDM. Target penerimaan BLU sampai akhir tahun sekitar 202 ini, tapi kalau kita anggap penerimaan kita masih kurang dari targetnya, dari target 62 miliar kita baru mengumpulkan 53,65, ini yang sudah kita terima. Namun demikian, sebenarnya ini ada piutang kalau kita mengikutkan piutang hingga Mei tahun 2022 kita capaiannya, sudah mencapai 66,07 miliar. Jadi sebenarnya kita melampaui target 3,64 miliar secara keseluruhan dari pendapatan BLU.

Demikian Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi Pak? yang lain mau tambahan dari kesekjenan? cukup Pak, dari teman-teman direktur? Oh sudah cukup ya.

Terima kasih banyak Pak, atas presentasinya.

Saya coba kasih kesempatan ini teman-teman anggota kita mau baca dulu atau langsung direspon, cukup? Ada tanggapan? Langsung ya, langsung aja direspon ya.

Ya, saya, silakan, apa? Sudah cukup ya. Ya, silakan dari Fraksi PDIP terlebih dahulu yang paling merah, *monggo*. Silakan Mbak Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Siap. Terima kasih Pak Ketua, Pak Maman dan ini kita panggil ini Pak kancil, tupai atau kancil.

Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya kasihi, Pak Sekjen ESDM dan seluruh jajaran dirjen dan setingkat dirjen dan seluruh staf yang hadir. Yang saya hormati dan yang saya kasihi seluruh rekan-rekan Komisi VII yang berkenan hadir di hari ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Minggu kemarin waktu mulai buka sidang, buka reses saya nggak sempat hadir. Jadi *minal aidin wal faizin*, mohon maaf lahir dan batin bagi semua Bapak/Ibu yang merayakan. Saya langsung saja ini karena yang punya sekjen tebal sekali, saya mulai dulu yang sektoral.

Yang pertama ini dari Dirjen Ketenagalistrikan, ini dengan *outline*-nya itu capaian kinerja 2022, realisasi DIPA dan progres kegiatan Ditjen Gatrik. Pak Rida yang saya kasihi dan saya sangat-sangat hormati, sering kalau kunjungan lapangan itu *anytime*, malam, kadang-kadang pagi-pagi udah kontak Pak Dirjen untuk mengecek apa saja berkaitan dengan urusan-urusan kelistrikan.

Dalam halaman 3, berkaitan dengan capaian kinerja 2022, saya ingin memulai dengan poin yang paling pertama yaitu penambahan pembangkit. Di sini realisasinya 49,4% dan harapannya ini target 2022 sesuai yang kita pegang saat ini.

Saya ingin gambaran umum aja, untuk penambahan pembangkit seperti yang Bapak sampaikan, saya minta *adjustment* juga mestinya kalau ini dipaparkan, *adjustment* juga sekalian dengan capaian yang dikerjakan juga oleh PLN. Jadi supaya kita *clear* karena keputusan pada saat pembahasan mulai dari Februari tahun lalu sampai dengan hari ini, khusus untuk daerah-daerah 3T dan daerah Indonesia Timur program ini menjadi program yang amat sangat menentukan nasib kami di tahun 2024, Pak. Ini saya langsung konkrit aja, saya langsung konkrit aja.

Nah, yang terjadi di kawasan 3T dan daerah-daerah perbatasan per sejak 2017 itu akan menjadi persoalan yang cukup rumit, penambahan jaringan, penambahan gardu dan penambahan lain-lain, transmisi terus dilakukan tetapi tidak disertai dengan penambahan pembangkit. Dilanjutkan dengan kebijakan per sejak tahun kemarin sampai dengan hari ini, progres yang kami dapatkan amat sangat lambat, Pak. Amat-amat sangat lambat sampai dengan kunjungan reses yang kemarin dalam beberapa perjumpaan, baik dengan Pak GM, dengan seluruh jajaran PLN yang ada di Ambon termasuk dengan Pak Direktur Regional.

Khusus untuk penambahan pembangkit ini Pak, sampai dengan informasi yang terakhir yang kita dapat katanya masih tunggu mesin lagi dari Jerman per Oktober, padahal ada tahapan-tahapannya, khusus untuk yang 97 PLTD MMU Maluku, Maluku Utara Pak, kan ada pembagiannya, mana yang sudah diselesaikan sampai dengan tahun 2021 kemarin sebesar 31 ya kalau saya nggak salah, kemudian sisa 66 atau sisa 60-an yang lain itu ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 skema.

Saya ingin penjelasan resmi hari ini tolong dijawab, karena informasi yang kita dapat sampai dengan hari ini penambahan, laporan dari lapangan semua kepala-kepala desa seluruh masyarakat telah menyampaikan bahwa penambangan jaringan jalan terus Pak, sementara mesin tidak turun-turun sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu apa kendalanya, mohon ini diberikan informasi yang pasti karena berdasarkan data kita yang paling terakhir per 2022 ini mestinya tuntas semuanya, per Oktober sesungguhnya tapi karena kondisi alam, kondisi cuaca ya mungkin kita bisa *extend* sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Kalaupun misalnya masih mundur lagi ke 2023, 2023 nih tahun politik Pak, semua orang pasti turun lapangan. Jadi mestinya pekerjaan-pekerjaan yang berat kayak gini tolong dikasih prioritas, nggak ada gunanya kita bicara panjang lebar hari ini.

Dirjen Gatrik sesungguhnya esensi dari hadirnya Dirjen Gatrik sesungguhnya adalah menjawab persoalan mendasar ini dulu, daerah-daerah yang defisit, daerah-daerah yang nggak punya listrik untuk ekstensifikasi listrik bagi daerah-daerah yang sudah maju, daerah-daerah industri untuk transisi menuju ke energi baru terbarukan, saya kira ini sambil jalan tetapi pondasi yang paling awal tolong selesaikan masalah listrik berbasis standar pelayanan paling minimum untuk setiap anggota masyarakat atau setiap KK yang ada di bumi Indonesia Raya ini.

Tolong Pak, kami jangan didiskriminasi berulang-ulang, saya minta maaf kalau terus-terusan saya ngomong seperti ini ya, ini tanggung jawab kita, Anggota DPR dibayar mahal untuk bicara, bicara, bicara dan bicara. Jadi tugas kami mengingatkan, mengingatkan dan mengingatkan kepada Bapak-bapak supaya ini dia bisa tuntas.

Yang berikut Bapak-bapak, untuk penambahan gardu induk, gardu distribusi, kemudian untuk penambahan transmisi. Saya memberi usulan Bapak-bapak, untuk penambahan gardu induk, gardu distribusi dan gardu transmisi Pak, tolong disesuaikan juga dengan ketersediaan pembangkitnya,

Pak. Yang kami takutkan begitu tiang-tiang transmisi, gardu-gardu induk, gardu distribusi dan lain-lain semuanya terpasang kita menunggu begitu lama, kenapa tidak dikonversi gitu loh.

Mesin disediakan kemudian lanjut lagi dengan pengembangan seperti itu, tapi karena ini sudah jalan terus sebenarnya ini juga sesuatu yang cukup menguntungkan bagi kami ya, karena walaupun mereka belum lihat mesin, Pak. Kemarin itu seluruh kepala desa dari 1 wilayah perbatasan di kawasan Maluku Tenggara Barat, di ujung utara dekat Australia itu di kecamatan Fordata Pulau Romean Pak, seluruh kepala desanya kumpul Pak waktu saya reses ketemu di sana. Mereka bilang, Ibu kami mengucapkan terima kasih sudah ada tambahan jaringan listrik lingkaran pulau kami, tapi sampai dengan hari ini mesinnya belum datang. Jadi yang sudah dipasang dari periode kemarin 2015, '16, '17 sampai dengan hari ini sampai tambahan baru lagi di periode ini mesin tidak turun-turun Pak, ini masih satu contoh kecil.

Yang kedua, Bapak-bapak, yang ketiga Pak, berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi listrik perkapita. Kalau bagian ini saya mengucapkan terima kasih sekali Pak, beberapa kecamatan-kecamatan tua yang lahir bersamaan dengan Republik Indonesia Raya ini, ketika Indonesia ini dibentuk kecamatan-kecamatan tua itu hadir, baru beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu bisa menikmati listrik 24 jam, antara lain Kecamatan Taniwel daerah pegunungan di daerah Seram. Itu diambil jalurnya langsung dari pembangkit listrik yang ada di Pasanea, saya mengucapkan terima kasih, terima kasih yang sangat luar biasa sekali dan ini beban PR yang akhirnya bisa terjawab setelah berkali-kali ini disampaikan.

Masih ada beberapa kecamatan tua Pak, yang sampai dengan hari ini listrik tidak 24 jam, antara lain kecamatan Larat, kecamatan Leksula. Kecamatan Leksula itu adanya di Buru Selatan Pak, kecamatan Larat itu adanya di kecamatan Maluku Tenggara Barat atau kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi ini sejumlah kecamatan-kecamatan tua yang sampai hari ini tidak merasakan, tidak merasakan, mereka ikut membentuk Indonesia Raya ini dan menikmati *privilege* dari hadirnya Indonesia Raya bersama-sama dengan Republik ini.

Jadi saya mohon tolong diprioritaskan Pak, kita tidak minta apa-apa ya. Pasanea ini baru saja mereka diberikan, dibangun, kemudian langsung 24 jam. Jadi waktu rapat yang terakhir itu di Pulau Seram, di Seram bagian barat saya agak *tone* agak tinggi. Saya bilang kalau bikin pengembangan jaringan penyediaan fasilitas pembangkit, tolong jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Bagaimana wilayah yang baru yang sudah lama lahir dengan wilayah yang baru saja bertumbuh dan dimekarkan kok yang ini 24 jam, yang ini begitu lama kok tidak 24 jam. Jadi mohon ini menjadi skala prioritas.

Yang berikut untuk realisasi DIPA, untuk realisasi DIPA pada statistik yang berbasis *pay* ini pada gambar peruntukan yang statistik *pay* peruntukan. Saya minta penjelasan konkrit dari Pak Rida, dengan pembagiannya itu ada 4. Warna hijau itu noninfrastruktur, operasional kantor itu warnanya coklat muda,

belanja pegawai biru dan infrastruktur itu *peach*. Saya minta dikonstatansi dengan jenis belanja, kalau peruntukannya yang berbasis juta rupiah ini saya hitung ya tadi untuk apa namanya belanja pegawai untuk 22,1%. Kemudian belanja infrastruktur itu 49% dan seluruh belanja ini Pak Rida, saya minta untuk yang warna hijau, warna biru dan warna coklat jadi belanja noninfrastruktur 17,1%. Kemudian belanja pegawai 22,1% itu saja sudah 39, sudah 40,1% ditambah dengan belanja yang warna operasional kantor ini adalah 11% maka sudah 50 sekian persen, yang buat saya itu adalah belanja noninfrastruktur, belanja yang nonpembangunan infrastruktur langsung.

Kalau lihat dari bagan ini artinya ada belanja-belanja yang tersublimasi, belanja-belanja pegawai yang tersublimasi masuk di dalam belanja noninfrastruktur di luar belanja pegawai dan belanja operasional. Jadi kalau belanja-belanja non infrastruktur ini kan evaluasi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Andi dalam pertemuan sebelumnya belanja kertas ini. Jadi kami mohon Pak, padahal kita dorong anggaran begitu besar masuk di Dirjen Gatrik ini supaya bisa menyelesaikan masalah listrik, Pak. Kami mau masalah listrik selesai, itu saja tapi kemudian ini tersublimasi *more than* 51 koma sekian persen menjadi belanja noninfrastruktur, bukan belanja noninfrastruktur ya, belanja yang bukan struktural. Maka rasa keadilan kami terhadap urusan listrik bagi masyarakat kecil ini kemudian apa ya tergores seperti itu. Jadi mohon kami minta penjelasan konkrit soal bagan *pay* ini.

Yang berikut pada halaman progres kegiatan ditjen, pada halaman 9. Untuk halaman 9 khusus untuk program BPBL, beberapa waktu yang lalu saya koordinasi bolak-balik terus dengan Pak Rida. Tujuannya adalah apa yang menjadi pagu kami 1.124 untuk tahap pertama ini betul-betul 1.124, kami minta supaya kalau ada misalnya *double, double* ID, *double* macam-macam atau ada kendala sehingga susut dari angka 1.124 laporan tolong balik segera, kami tidak mau nanti sudah di akhir tahun baru oh tidak bisa lagi untuk ditambahkan.

Tolong disegerakan supaya kami tahu masing-masing kita yang ada di Komisi VII ini, kita yang mengalami pemangkasan, penyusutan karena ada masalah-masalah teknik administrasi verifikasi, verfak, verifikasi faktual atau verifikasi administrasinya kita jadi tahu per orang berapa yang hilang dari kuota tahap pertama ini. Untuk kami yang ada di daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang hari ini cukup sulit masalah listriknya, masyarakat amat sangat membutuhkan.

Kemarin itu saya mau nambah sesungguhnya waktu koordinasi dengan Pak Rida karena kemarin ada beberapa masukan bahwa ada satu kawasan di daerah pegunungan atas listrik sudah masuk sampai di atas, di ujung di ujung tiang itu. Itu daerah suku-suku terasing Pak, jadi kalau memang masih ada kurang dari hasil verfak dan hasil verifikasi administrasi itu saya mau masukan tambah sebelum SK diterbitkan untuk Maluku tahap yang pertama ini, Pak. Jadi jangan sampai kami dibuat sedemikian rupa akhirnya tidak mampu lagi memasukkan usulan karena keterbatasan waktu di ujung-ujungnya seperti itu. Jadi buat kami itu aja kendala Pak, tidak ada kendala yang lain semua masyarakat hari ini hanya menunggu kapan BPBL ini dilaksanakan.

Yang berikut ini untuk halaman 10 Pak, ini cukup banyak nih Dirjen Kelistrikan. Untuk halaman 10 dengan halaman 10, 11 dan 12 saya lihat ada sejumlah program-program publik nonfisik yang sifatnya *redundent* Pak, jadi misalnya program-program yang berkaitan ini saya udah lingkari ini, fasilitas penyelidikan dan penyidikan bidang ketenagalistrikan. Apa bedanya dengan fasilitas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal, itu kan semua masuk di urusan-urusan yang melanggar ketentuan hukum. Mestinya dia di bikin menjadi satu nomenklatur aja jadi tidak banyak, kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan belanja publik nonfisik ini bisa kita klusterkan menjadi satu bagian dan mudah untuk, daripada dipecah-pecah seperti begini akhirnya buat saya ini menjadi *redundent* dan program menghabiskan anggaran.

Jadi kemudian fasilitas pelaksanaan pengawasan tingkat mutu pelayanan PT PLN, kalau bicara tentang mutu pelayanan *quality control* itu berarti ada persoalan-persoalan yang membuat tidak tercapainya *quality control*, entah persoalan teknis, entah persoalan masalah hukum, kan tinggal dibagi dua kalau urusannya ini berkaitan dengan urusan pengawasan penyelidikan dan penyidikan. Ada yang urusannya administratif, ada yang urusannya teknis, ada yang urusannya hukum tinggal dibagi aja nggak terlalu susah. Jadi kita cara mengevaluasinya menjadi gampang daripada anggaran dipecah-pecah kemana-mana, padahal ada kepentingan banyak yang bisa kita selesaikan untuk penuntasan listrik di lapangan.

Ini beberapa contoh kecil walaupun saya lihat di sini, walaupun dalam surat kita minta satuan 3 ya. Satuan 3 itu tidak dalam semangat perencanaan karena itu dilarang oleh aturan negara, oleh ketentuan tapi kita rapat ini, rapat evaluasi, rapat pengawasan dan evaluasi. Jadi mestinya satuan 3 dihadirkan karena ini berelasi dengan alokasi anggaran penuntasan realisasi program dan di mana lokasinya, betul-betul apakah masyarakat menikmatinya atau tidak. Jadi tidak ada tendensius yang lain-lain, saya menangkap ini hampir semua tidak memberikan satuan 3 mungkin apa, takut karena apa atau mungkin ada apa, padahal ini sebenarnya tujuannya untuk pengawasan.

Yang berikut untuk Dirjen Kelistrikan itu sudah selesai, yang berikut ini untuk saya minta maaf ya. Yang berikut saya minta waktu sedikit untuk Dirjen EBT, untuk Dirjen EBT sebagaimana yang kita ketahui yang saya pantau benar ya bahwa untuk program PJU-TS ada yang sifatnya itu *multiyears contract*. Nah, untuk yang *multiyears contract* kami minta kepastian itu kapan selesainya karena itu dia menjadi satu paket kesatuan dengan usulan yang tahun kemarin, itu yang pertama.

Yang kedua, kami minta untuk apa ya, pihak kontraktor yang mengerjakan program-program seperti ini tolong membeli barang sesuai dengan SOP karena saya tidak tahu ya saya tidak lihat langsung *one by one, case by case*. Tapi ada beberapa masukan dari masyarakat, Bu Mercy kok ini dia agak lain dengan yang program-program yang sebelum, PJUTS yang sebelumnya gitu loh. Saya nggak tahu ya tiangnya atau fasilitas apanya saya agak nggak jelas, jadi mungkin bisa di-internal-kan *check and control* supaya memastikan *quality control* dari PJUTS ini dia bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Yang berikut untuk program PJU atap apa namanya PLTS Atap, kurang lebih sekitar 100 sekian, 108 unit. Kami minta kejelasan dari Dirjen EBT, 108 unit itu di mana aja Pak? Kalau setiap Anggota DPR bisa diusulkan 22 unit seperti itu kita taruh di mushola, kita taruh di pesantren atau kita taruh di asrama-asrama mahasiswa yang apa namanya paguyuban-paguyuban, yang dari kampung-kampung dari kecamatan itu kan ada ya mereka daripada mereka bayar listrik sendiri mendingan dikasih ke sana, Pak. Jadi buat saya kalau ditaruh di kantor-kantor, kantor punya uang ada gitu loh. Kalau taruh di gedung-gedung publik ada dana reguler yang mereka punya, mestinya diperuntukkan ke tempat-tempat yang tidak punya akses apa-apa termasuk modal, termasuk dana dan tidak punya sumber listrik apapun, taruhlah di sana gitu loh.

Jadi ini karena lokasinya tidak keluar jadi kita minta untuk nanti ada paparan dari Pak Dirjen EBT untuk bisa memastikan bahwa PLTS atap ini diperuntukkan di mana saja, di wilayah mana saja dan kami sangat berharap bahwa wilayah yang ditempatkan ini adalah wilayah-wilayah yang betul-betul membutuhkan listrik, wilayah-wilayah yang memang kelompok masyarakatnya itu memang tidak mampu. Jadi mungkin itu sebagai tidak mampu atau tidak punya akses terhadap sumber-sumber energi yang lain, tapi kalau ada energi-energi yang lain yang ada di sekelilingnya kemudian ditambahkan lagi PJU atap, kalau PJU atap hanya *modeling* untuk ditempatkan di pusat-pusat kota atau pusat industri dan mendorong sehingga pusat bisnis, kawasan bisnis yang lain itu melakukan hal yang sama dan membeli dari investasi *investment fund* mereka sendiri itu saya angkat jempol, tapi kalau kemudian ini dibikin gagah-gagahan di dalam kota-kota, di mana-mana yang sudah *over supply* listrik agak disayangkan saja, Pak, sangat disayangkan.

Jadi saya kira itu dan kita tetap mendukung terus Dirjen EBT untuk mencapai capaian penurunan emisi karbon sampai dengan 2030 kita akan capai 23%. Akhir tahun ini kita akan diperkirakan ini mencapai 15% ya Pak dan saya percaya akan kita apa namanya pantau, ikutin terus, evaluasi terus apa yang bisa kita dukung dari Komisi VII.

Yang berikut ini dari dirjen, dari kegiatan pengembangan SDM. Ini saya langsung aja Pak, kita langsung buka halamannya untuk pelatihan-pelatihan. Jadi di sini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal realisasi sampai dengan akhir Mei 29,62 ini kami memberikan catatan, ini baru caturwulan ya. Jadi tolong ini digambarkan kepada kami kenapa capaiannya baru sekitar 29% walaupun misalnya karena kan bulan Mei itu kan udah 5 bulan ya, *almost* setengah semester, mustinya setengah dari anggaran itu sudah harus terealisasi. Apakah karena ini berkaitan dengan, padahal kan ini kan cuma pelatihan-pelatihan ditambah dengan mendukung apa namanya Akamigas blok Cepu.

Untuk pengembangan sektor ESDM poin 5, ini saya lihat kegiatannya menarik-meng menarik sekali, pelatihan pemandu wisata di Provinsi Bangka Belitung, kemudian pelatihan pengeboran dan peledakan, pelatihan mungkin ada yang

teknis kepada tenaga kerja, kepada pegawai atau tenaga kerja BUMN, tapi ada juga yang untuk masyarakat.

Untuk yang masyarakat sendiri kami mohon gambaran Pak, ini kok ada pelatihan misalnya di Maluku 43 peserta yang kami juga nggak tahu gitu. Padahal kalau kita bisa hadir enggak usah bayar Pak, kami diundang aja untuk jadi salah satu narasumber untuk kegiatan apa lah berkaitan dengan urusan EBT, kita akan dukung penuh Pak, kalau bisa disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan Kunker Dapil kita kunjungan, itu jauh apa namanya lebih efektif seperti itu. Yang kami takutkan Bapak-bapak melaksanakan kegiatan ini, masyarakat tanya dan kita kayak orang bengong di lapangan, oh jadi ternyata ada kegiatan ini yang dilaksanakan oleh EBT tanpa kami tahu. Jadi ini mungkin sebagai catatan kepada Pak Dirjen.

Yang berikut lagi adalah berkaitan dengan distribusi tenaga, distribusi hasil tenaga terdidik dari Akamigas dan Blok Cepu itu. Di catatan di sini halaman 10, Bapak udah bikin catatannya cukup luar biasa ya, masa tunggu untuk tahun 2020 kurang dari 6 bulan 83 orang lebih dari 6 bulan, kemudian 2021 274 dengan rincian. Pada saat rapat beberapa waktu yang lalu di tahun yang lalu saya memberikan *stressing* yang sangat-sangat amat keras kepada Pak Dirjen atau Pak Kepala Badan berkaitan dengan distribusi lulusan ini. Kami minta Pak, tolong diberikan *privilege* kepada kabupaten-kabupaten yang menggunakan APBN-nya sendiri Pak, kan kerja sama dengan pihak Akamigas, kerjasama dengan pihak Kementerian ESDM. SK keluar setiap tahun, yang diprioritaskan ternyata adalah mereka-mereka yang lulusan yang mendapat beasiswa langsung dari kementerian. Sementara beasiswa-beasiswa dari mahasiswa yang diperoleh dari dana APBN murni dari kabupaten-kabupaten terkait kecil sekali kuotanya. Apa beda APBN dan apa beda APBD? Sama-sama anggaran negara, sama-sama dana yang dipakai untuk kepentingan rakyat banyak mestinya tidak boleh ada perbedaan di sini

Jadi saya mohon untuk yang bagian ini Pak, tolong diberikan kepada kami penyebaran presentasinya. Berapa persen serapan kepada semua sabaran lulusan ini, cukup banyak ini, berapa persen yang dari lulusan berdasarkan beasiswa dari kementerian dan berapa dari beasiswa yang nonkementerian, saya ingin lihat. Tolong dan tolong, dana di wilayah kami Pak, APBD provinsi Maluku cuman 3,1 triliun Pak, 11 kabupaten kota, 1.492 pulau Pak. Bandingkan dengan satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah bedanya langit dan bumi, kita cover ini satu provinsi padahal di daerah lain itu anggaran APBN, APBD satu kabupaten saja.

Dana yang sudah kecil seperti ini karena dukungan dan dorongan bolak-balik kami memastikan supaya ayo kirim, ini dalam rangka untuk mempersiapkan sumber daya kita bagi hadirnya Blok Masela tapi kalau kemudian sudah dilakukan panjang seperti ini, APBD sudah digelontorkan begitu banyak tapi kok serapannya sangat kecil sekali, ini yang mengganggu kami sungguh-sungguh. Nanti lain kali kita mau dorong lagi anggaran dari pemerintah daerah untuk masuk ke Akamigas kita mikir-mikir karena pemerintah bilang, Bu Mercy serapannya kecil sekali yang kita kirim begitu banyak kok yang diterima 1-2 orang aja. Jadi ini cukup sangat terganggu Pak,

bagian yang Litbang ini, kok Litbang, namanya untuk pengembangan SDM. Saya dari periode kemarin teman-teman malas untuk mengurus ini karena rasa-rasanya nggak ada duit di sana, tapi saya mengurus ini Pak, karena apa? Ini berkaitan dengan sumber daya manusia.

Jadi mohon dan mohon sekali lagi untuk ini diperbaiki dan bisa memberikan asas kemanfaatan yang luar biasa bagi seluruh yang ada di satu Indonesia Raya ini, termasuk yang ada di wilayah-wilayah 3T. Saya punya beberapa catatan yang berkaitan dengan persoalan yang tadi telah dibahas.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Bu Mercy.

Memang satu-satunya Mercy yang nggak bisa dinaikin cuma Bu Mercy, kalau saya Mercy-mercy yang lain bisa kita naikin ya, udah dicatat tadi Pak ya.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar, saya perkenalkan ini ada Anggota baru Pak, Pak Bambang. Beliau dulu di Komisi V dapilnya Indramayu-Cirebon, soalnya saya ini orang Kalimantan Barat bukan Jawa Barat.

Silakan Pak Baher, *monggo*.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Baik, *Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Terima kasih, Pimpinan atas kesempatannya.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII. Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, Kepala BPSDM yang saya hormati dan saya banggakan.

Ini saya baru masuk Pak, saya masih meraba-raba ini Pak, tapi dari beberapa paparan yang Bapak tadi sampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan berkaitan dengan ini di Dirjen Gatrik, Pak. Ada penambahan gardu distribusi, kalau di kampung Pak di kita itu, sekarang itu lagi ada trennya usaha ternak ayam, Pak. Ternak ayam itu biasanya itu didirikan itu di tengah-tengah sawah Pak, di tengah sawah ataupun di hutan yang memang di sana belum ada jalur listrik. Nah, yang saya pertanyakan adalah bahwa apakah penambahan gardu distribusi di sini, ini menjadi bagian penambahan gardu distribusi apabila ada penambahan pasang baru di sana Pak, karena itu yang saya pahami dan saya banyak ditanyakan oleh teman-teman adalah ketika ada pemasangan baru, ini biaya untuk pemasangan baru, kemudian gardunya dan sebagainya ini menjadi tanggungan pengguna, Pak. Ini mohon juga diberikan penjelasan Pak.

Kemudian kebetulan tempat tinggal saya ini tidak jauh dari PLTU 2 Indramayu ya. Kalau saya melihat proses pembebasan lahan, kemudian pembangunan yang sekarang sudah sampai pada pembangunan tower transmisi Pak ya ...*(suara tidak jelas)*.. nya sudah selesai tapi kelihatannya kok mandek sekarang Pak. Saya banyak ditanya masyarakat di sana, konon katanya kalau Anggota DPR tahu Pak. Ini nasibnya bagaimana PLTU 2 Indramayu, PLTU 2 Indramayu, apakah masih dilanjutkan atau memang sengaja ditahan oleh karena sesuatu hal.

Kemudian yang terkait dengan tadi telah disampaikan juga Bu Mercy, ini terkait dengan pelatihan, Pak. Apakah ada program-program pelatihan yang memang itu menjadi program aspirasi Anggota Dewan, ini karena saya memang baru masuk, mohon ada penjelasan Pak Dirjen dan Kepala BPSDM.

Saya kira sementara itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang ganteng, satu komisi sama saya dan juga satu dapil, Dapil 1 loh, rebutan daerah tapi kami yakin Pimpinan kami baik.

Pimpinan saya langsung kepada Pak Dirjen, supaya nggak stress. Pak Dirjen, yang saya ingin tanyakan tadi kan Bu Mercy udah banyak menanyakan yang penting-penting ya. Saya hanya menanyakan yang ringan saja tentang PJUTS, PJUTS itu selama kami ada di Komisi VII kan sudah banyak kami dapat, tapi juga banyak kendala yang kami hadapi Pak, kami sangat malu di dapil, lampu itu 3 minggu sudah banyak yang mati. Yang saya ingin tanyakan tender-nya itu bagaimana Pak? Apakah orang-orang yang seperti itu masih dipakai, yang malu kan kami di dapil Pak. Jadi tolong saya minta dengan sangat perhatikan petender-tender kita, jangan mereka hanya memberikan barang rongsokan saja yang bertahan hanya 3 minggu, tapi selanjutnya menjadi tiang-tiang rongsokan di dapil kami, itu satu Pak.

Yang untuk Pak Rida, saya juga banyak menemukan di dapil kami Pak, sudah banyak pemasangan listrik. Tapi sampai hari ini banyak juga yang belum dialirkan listrik, kabelnya aja sudah masuk Pak. Kami kan, saya dengan Pak Maman ini dapilnya sama, daerah kami itu 3T-nya banyak Pak, 5 kabupaten, jadi kurang lebih dengan Bu Mercy lah, walaupun Bu Mercy banyak laut tapi kami banyak pintu ke daerah seberang. Jadi harapan saya Pak, mereka di daerah Malaysia ujung Serawak itu jalannya mulus, listriknya bagus, daerah kami jalannya rusak listriknya nggak ada. Pintunya dekat sekali Pak, tinggal buka sebelah udah jalan. Jadi harapan saya terutama daerah Sambas Paloh itu Pak, itu tolonglah diperhatikan daerah terpencil, semua fasilitas dari pemerintah itu rasanya tidak adil untuk daerah kami. Daerah Bengkayang Jagoi Babang demikian juga, apalagi Kapuas Hulu Sintang itu juga sama, kalau daerah Sanggau masih *oke* Pak, tapi untuk 4 daerah ini sangat terbatas dengan aliran listrik. Jadi saya harapkan kalau pemasangan listrik untuk desa itu dusunnya per KK harus dimasukkan Pak, saya yakin kalau desa sudah dialirkan listrik tidak mungkin Bapak akan kembali lagi untuk melihat dusun-dusun, sudah puluhan tahun selama merdeka mereka tidak merasakan listrik, bagaimana mereka bisa pintar karena tidak ada informasi yang mereka dapatkan.

Jadi harapan saya sudah tidak muluk-muluk lagi Pak, tolong perhatikan desa dusun per KK, nggak ada lain Pak. Saya nggak mau 100% aliran listrik di anggap sudah 100% karena desa, tapi saya mau desa beserta dusun-dusunnya harus dialirkan listrik itu baru namanya PLN *oke*.

Saya rasa sekian dan terima kasih.

Selamat siang.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Selamat siang Bu.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Pak Pimpinan, boleh nambah nggak?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Boleh, masa ga boleh sih. Khususlah pokoknya buat Gerinda ini kita kasih bonus satulah.

Silakan, silakan.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Terima kasih, Pimpinan yang ganteng.

Terima kasih Pak Bambang, eh Pak Bambang, pimpinan ada Bambang ada anggota Bambang, maaf, maaf. Pak Maman, terima kasih.

Selamat siang.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Sekjen ESDM, Bapak Dirjen EBTKE, Bapak Dirjen Gatrik, ada Kepala BPSDM.

Saya langsung *to the point* aja, ini ada masalah mengenai program bantuan pasang baru listrik, pemasangan listrik baru. Ada kejanggalan di dapil saya, yang kemarin-kemarin saya dengar itu dari teman-teman, yang mengajukan data dari DTKS itu ada *double-double*. Nah, kalau kebetulan saya itu mengajukan titik-titik pemasangan itu dari daerah kecamatanlah, kelurahan atau desa kemudian kita sampaikan datanya ke ESDM. Lalu ESDM mengeluarkan surat untuk pemasangan di dapil untuk diimplementasikan, yang terjadi surat dan data yang disampaikan dapil itu *double-double*, kayak satu nama ada 2, ada *double*. Ini saya datanya ada, misalnya dari 10, 10 itu namanya double semua Pak, bahkan ada nama yang alamatnya sama. Saya sempet minta staf untuk tanya ke bagian, dari stafnya Pak Rida, jawabannya juga gantung gitu loh membingungkan karena terus terang saya juga takut ini jadi temuan atau apa gitu loh, apa ini nanti implementasinya itu tetap dipasang *double* atau gimana. Jadi butuh keterangan aja gitu jelas ataukah misalnya saya jatahnya misal dapat 10 gitu karena *double* jadi ngurangin jatah saya, itu kan harus *clear* gitu mumpung belum direalisasikan.

Mungkin hanya itu saja sih Pak uneg-uneg saya mengenai pemasangan listrik baru, sudah diwakili sama Bu Mercy yang tadi berapi-api. Semangat untuk Bu Mercy.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Merdu sekali Pak suaranya, saya hampir pengen tidur, saya. Iya, ya, iya padahal salah sebut nama loh tadi, waduh, memang saya ini selalu kalah sama yang namanya Bambang. Selanjutnya Nasdem, wah ini pengantin baru Pak, jadi kalau Bapak lihat lagi *fresh* sekali, *fresh from the oven*.

Silakan Mbak Ina Kobak.

F-NASDEM (INA ELISABETH KOBAK, S.T., M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati.

Rekan-rekan Komisi VII.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen EBTKE, Dirjen Gatrik, Kepala BPSDM.

Saya ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai pemasangan PJUTS. Kalau tadi Bu Mercy berbicara mengenai program di Dapil 3T karena daerah kami masih termasuk dalam daerah 3T. Untuk pemasangan PJUTS sangat lambat sekali dan kalau di sini kita lihat masuknya dalam PJUTS, mungkin masuk PJU Indo 3 ya Bapak Dirjen? *Oke*, saya harap untuk kedepannya kami untuk daerah 3T harus diutamakan untuk pemasangan duluan karena sampai sekarang ini masih ada beberapa titik yang belum terpasang, daerah-daerah di Jawa sudah terpasang sementara kami sangat lambat sekali dan saya berharap kedepannya untuk daerah-daerah yang menjadi prioritas 3T ini bisa jadi prioritas pertama untuk pemasangan PJUTS, itu yang pertama.

Yang kedua mengenai Apdal, inikan terpasang untuk 2 provinsi saja, Provinsi Papua, Papua Barat. Jadi ini tim yang turun ke lapangan ada *misscom* bersama dengan tim kerja kami yang ada di lapangan, jadi setelah barangnya sudah terpasang baru kami tahu dan itu kalau menurut saya sangat merugikan. Memang untuk daerah-daerahnya kami yang ajukan tapi lebih bagus lagi untuk waktu mau pemasangan kami tahu, sehingga ada tim kami juga yang bisa turun ke lapangan, itu yang kedua.

Yang ketiga untuk Dirjen Gatrik, Pak untuk penguatan pemenuhan ...*(suara tidak jelas)*...10, penguatan pemenuhan aksis dan konsumsi listrik pada masyarakat, serta percepatan tenaga listrik 24 jam perhari sudah progres 31% Pak. Saya harapkan disini ada penjelasan mengenai tempat-tempat yang lokasinya di mana saja untuk dukungan 24 jam perhari karena Bapak sendiri tahu bahwa di daerah kami pun daerah 3T pasti lampunya nyala cuman 8 jam saja dan kami berharap prioritas, diprioritaskan untuk daerah 3T yang memang membutuhkan listrik 24 jam ke depannya.

Mungkin dari saya sekian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih banyak Mbak Ina.

Selanjutnya dari PKB ini, saya susah kalau nyebut itu bisanya PKP ya silakan Bu Ratna yang paling Juwita.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII.

Yang kami banggakan Pak Sekjen ESDM, Pak Dirjen Gatrik, Dirjen EBTKE, Kepala BPSDM beserta segenap jajarannya.

Kita *flashback* sejenak Ketua, saya ingin kita mengenang kembali bagaimana atas perintah para Pimpinan yang ada di Komisi VII. Kami Anggota Komisi VII yang ditugaskan di Badan Anggaran tahun lalu berjuang berdarah-darah untuk bisa menaikkan anggaran dari Kementerian ESDM ini 750 miliar.

Tentu hal itu tidak kita laksanakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan atau kepentingan siapapun tidak, tapi bagaimana kita lakukan itu dengan sekuat tenaga untuk memberikan *support* kepada Kementerian ESDM agar bisa lebih memberikan kontribusi yang real kepada masyarakat. Wujudnya apa? Tentu diwujudkan dengan program-program yang menyentuh langsung ke kepentingan-kepentingan rakyat. Saat itu kita sepakat, meskipun saat sudah ada penambahan anggaran, terima kasih saja tidak ada disampaikan kepada kami yang berjuang. Kami tidak meminta terima kasih, tapi kami meminta komitmen, apa nih bentuk komitmen dari Kementerian ESDM saat kami sebagai mitra sudah berjuang sedemikian rupa untuk memberikan *support* kami.

Mohon diingat kembali, karena ini adalah masa-masa kita juga akan menyusun kembali rencana anggaran yang akan kita laksanakan ke depan. Persis apa yang dibilang oleh Mas Maman, kalau udah waktu-waktu anggaran biasanya mitra ini manis-manis sekali kalau sama kami kan, ada butuhnya begitu tapi nanti kalau anggaran itu sudah disetujui, sudah waktunya untuk dilaksanakan, ditelepon aja nggak diangkat, di WA aja tidak ada yang membalas gitu. Padahal kami di sini juga melaksanakan fungsi, bagaimana kami harus mengawasi apa yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu terima dari negara ini, bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk rakyat, sudah itu saja. Ya mohon maaf kalau memang kami telepon, kami WA itu selalu ada masalah ya mohon maaf karena kalau tidak ada masalah kami tentu tidak ingin mengganggu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Silakan menjalankan tugas dengan baik, tapi begitu ada masalah tolong diberikan respon yang baik, mari sama-sama memanusiasikan manusia, jangan diingat kalau pas butuhnya aja Bapak-bapak.

Masuk ke hal-hal yang ingin kami *stressing* setelah pemaparan Bapak tadi, untuk Pak Dirjen Gatrik. Urusan kita tentang rasio elektrifikasi ini belum selesai Pak, sebelum adanya revisi Undang-undang Ketenagalistrikan Ketua. Kami mohon itu juga dimasukkan sebagai agenda untuk Komisi VII sehingga kita bisa sama-sama ngerti nih, itung-itungan rasio elektrifikasi ini seperti apa? kok ngomong 99,8% ini dari mana, jangankan kita ke Indonesia Timur, di Jawa Timur saja Ketua, ada 66.000 kepala keluarga yang belum menerima listrik, bayangkan.

Yang berikutnya program Indonesia terang yang hampir saja sudah kita lupakan, ini targetnya sampai kapan, pencapaiannya itu sampai mana, *output* dan *outcome*-nya seperti apa? Sehingga *flagship* dari Pak Presiden ini loh bisa bener-bener dipertanggungjawabkan oleh Kementerian ESDM.

Yang berikutnya, tadi banyak sekali keluhan tentang BPBL yang pengajuannya juga tidak sederhana. Kami juga sudah berusaha mengikuti alur, menepati SOP yang disampaikan oleh Pak Dirjen, 1.124 Pak, ini tolong jangan dikurangi lagi. Ini menyangkut nama baik kami dengan konstituen, seperti yang disampaikan Bu Mercy tadi, muka kami mau ditaruh di mana Pak, kalau saat kita survei, kita kumpulkan perlengkapan itu kita sudah menyampaikan ke Beliau-beliau ini akan mendapatkan bantuan dari pemerintah bla, bla, bla gitu. Jumlah menjadi masalah, ketepatan juga menjadi masalah karena ternyata Ketua, data dari usulan yang kami sampaikan dengan survei yang ada di lapangan itu berbeda Ketua. Ini juga menjadi masalah karena belum tentu Pak yang didatangi oleh surveyor Bapak ini adalah orang-orang yang sudah kami janjikan. Ini tolong segera dikoordinasikan kembali Pak, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan program ini dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama.

Yang berikutnya untuk Bapak Dirjen EBTKE, Pak Dirjen halaman 3 tadi disampaikan target 647,8 capaian 66, baru tercapai 10% padahal ini sudah bulan 6. Saya kok enggak yakin Pak, kalau sampai akhir tahun Bapak ini bisa menepati target yang Bapak tentukan sendiri. Kira-kira Pak, kira-kira ada nggak strategi yang *extra-ordinary* yang sudah dipersiapkan oleh Dirjen EBTKE dalam hal ini untuk bisa memenuhi amanah dari RPJMN, sehingga sampai di 2023 nanti, *sorry* 2025 nanti kita bisa mencapai 23% bauran energi baru terbarukan. Ini memang pertanyaan yang saya ulang-ulang Pak karena saya ulang-ulang aja nggak pernah dijawab gitu loh, apalagi kalau nggak pernah ditanyakan.

Jadi saya mohon Pak Dirjen, Bapak ini hari ini lagi naik daun karena Pak Presiden ini berulang-ulang selalu ngomong tentang EBTKE-EBTKE begitu kan apalagi menyambut forum G20 yang beliau ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pionir dari transisi energi, mohon diberikan buktilah apa yang kita bisa sajikan kepada tamu-tamu kita nanti.

Yang berikutnya, saya ingat betul Pak masalah PJUTS, dulu senior-senior kami seperti Bu Andi dan lain-lain itu sering menyampaikan, apa tidak ada regulasi yang lebih sederhana untuk bisa kami gunakan sebagai pengganti dari surat persetujuan Pemkab ini loh yang menerima PJUTS ini loh. Kami ini ada di sini karena kondisi politis Pak, jadi tidak menutup kemungkinan kami-kami yang ada di sini itu tidak sejalan dengan pimpinan daerah kami masing-masing, sehingga kalau memang regulasi itu yang terus-menerus digunakan kami khawatir, kami tidak bisa memenuhi, sehingga konstituen kami yang seharusnya bisa menerima program-program tersebut menjadi tidak bisa merasakannya begitu. Ini aja, izin Pimpinan kami sudah 5 bulan mengajukan kepada kepala daerah tapi sampai hari ini belum ada surat balasan, tidak dibalas, diterima juga nggak, tidak dibalas ditolak juga nggak. Nah, ini kan kami susah Pak, tolonglah mungkin kalau misalnya ada regulasi yang lain, diganti surat keterangan dari pemerintah desa misalnya. Pemerintah desa itu kan juga tangan terbawah kan dari pemerintah begitu, kalau misalnya bisa itu akan kami tempuh begitu. Pokoknya jalan yang lebih mudah lah supaya masyarakat yang ada di dapil ini bisa menerima program tersebut.

Yang terakhir kepada Bapak Kepala BPSDM halaman 5 Pak, tadi disampaikan ada BPSDM-geominerba dan juga petugas penanganan bahaya gas. Nah, kira-kira divisi ini juga nggak ya Pak, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi maupun survei sebelum proses pengeboran yang dilakukan di lokasi-lokasi sumber geothermal dan gas. Kalau memang iya, kira-kira apa Pak bentuk *responsibility* dari divisi ini, untuk sebagai apa ya istilahnya kemarin itu kan kita sudah memanggil yang geothermal itu ya Pimpinan, yang Sorik Merapi karena ada kebocoran gas berkali-kali yang sudah menimbulkan korban jiwa banyak sekali juga. Nah, kalau misalnya ini memang divisi yang bertanggung jawab di hal tersebut, apakah sudah bekerjasama dengan Dirjen EBTKE juga untuk melaksanakan mitigasi dari bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan operasional, sumber-sumber EBT tersebut.

Mungkin itu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

Wallahul muwafiq lla aqwamitthariq.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Dirjen, saya mau kasih *stretching* tadi terkait apa yang disampaikan oleh Bu Ratna mengenai realisasi program, ini saya pikir untuk semuanya ya bukan hanya Dirjen EBTKE. Saya pikir nanti juga untuk dirjen-dirjen yang lain terkait realisasi program Komisi VII, memang kita paham sekali dan sadar sekali terkadang memang realitas di bawah itu kan banyak sekali dinamika politik yang memang terkadang nggak bisa kita hindari. Tapi jangan sampai dinamika politik yang tidak substantif itu mengakibatkan masyarakat menjadi berkorban untuk tidak bisa mendapatkan program yang memang akan didistribusikan oleh Komisi VII. Jadi saya minta melalui rapat ini dirjen masing-masing apabila ada kondisi-kondisi seperti itu mungkin disiapkan opsi kedua atau opsi ketiga. Artinya kalau tidak menutup kemungkinan mungkin bisa dengan jalur ada surat jaminan dari dirjen atau apalah. Secara prinsip kan sebenarnya yang penting program ini terealisasi karena ini tidak menutup kemungkinan kejadian di dapilnya Mba Ratna ini bisa terjadi juga di dapil-dapil yang lain gitu.

Jadi saya pikir coba itu disiasati Pak seperti apa, bagaimana karena toh faktanya PJUTS itu hampir di seluruh Indonesia, 34 provinsi daerah itu nggak ada yang tanggung jawab juga. Makanya itu juga saya mau, sebetulnya tadi disampaikan Bu Katrin itu sama itu yang terjadi di semuanya. Barang baru dipasang 3 minggu enggak lama 1 bulan, ini udah dari periode yang lalu loh Pak kita angkat. Kalau sampai kesekian kalinya terjadi kan pasti ada sesuatu, ada apa? Kok nggak pernah mau belajar gitu dari kejadian itu. Kalau saya sih saya nggak mau, nggak mau saya kejar kontraktornya Pak, ngapain kita mesti marah-marahin kontraktornya ya pelaku user di dirjen Bapak aja. Kuncinya kan di Bapak-bapak semua nih, artinya kalau kontraktor-kontraktor yang sudah

bermasalah kayak begitu, nggak usah lagi dikasih kesempatan, *blacklist* aja kok pusing-pusing, mau diintervensi lewat mana kan ada disini lewat kita. Kita paham lah kadang-kadang urusan-urusan kayak begini kan banyak titipan kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Saya tegaskan sekali lagi kalau kualitasnya tidak memenuhi *requirement*, coret Pak. Ini hati-hati loh Pak ini jangan sampai nanti muncul batas kesabaran kita, kita panja-kan betul-betul Pak urusan PJUTS ini karena anggaran itu lumayan gede loh, total berapa anggaran PJUTS setiap tahunnya? Ada Pak, 300 miliar itu setiap tahun itu loh. Maksud saya kita tuh cuma minta satu Pak, saya pikir nggak neko-neko sih kualitasnya aja, nggak ada yang lain.

Jadi saya rasa itu menjadi catatan, jadi ada 2 dua Pak catatan terkait PJUTS. Yang pertama, mungkin untuk semua dirjen apabila ada beberapa kendala situasi politik yang memang akhirnya sulit mendapatkan rekomendasi di kepala daerah, saya berharap dari Kementerian ESDM bisa mencari solusi alternatif karena jangan sampai gara-gara dinamika politik yang tidak substantif akhirnya berdampak kepada realisasi program yang mau kita berikan kepada masyarakat. itu yang pertama.

Lalu yang kedua, kualitas produk Pak. Ingat loh Pak ya ini saya tuh orangnya nggak pernah main-main loh Pak, kalau saya udah ngomong, saya kasih sekali-dua ini penekanan yang kedua, Pak. Kualitas produk ini mana Eselon 2, Eselon 3-nya di EBTKE ini, saya mungkin Pak Dadang nggak sampai detail kali tapi ini kualitas produk, jangan sampai nanti saya, saya udah mulai ada niat nanti saya mau tugaskan anak buah saya Pak di lapangan, itu saya mau rekam satu-satu Pak, saya viralin satu Republik Indonesia ini. Kalau udah kayak gitu nanti jadi panjang Pak, karena kenapa? udah kesekian kalinya nih kualitas produk ini nggak jalan-jalan, nggak ada perbaikan gitu. Jadi barang seminggu, dua minggu masih *oke*, satu bulan ada Pak sempet yang 3 bulan itu masih ada, 2 bulan itu masih ada tapi tiba-tiba tuh rata-rata lewat dari 3 bulan itu udah mati. Ini saya nggak ngerti problemnya di mana, apanya bagaimana gitu. Ya itu kan memang kesepakatannya *maintenance* kan ada di kabupaten Pak ya, betul ya secara aturan begitu ya.

Kalau sudah diserahkan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kalau sudah diserahkan, kalau belum diserahkan berarti masih di?.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA):

Masih di ESDM.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Di ESDM *oke*, jadi artinya titipan saya dua itu aja Pak. Jadi tolong ini jadi penekanan betul-betul kualitas produk. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya terkait barang.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat, Mas Sartono.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Mas Maman yang kami hormati, Pimpinan Komisi VII.

Para sahabat Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun *virtual*. Dan Pak Sekjen, Pak Dirjen Listrik, Dirjen EBTKE dan Kepala BPSDM dan seluruh jajaran Kementerian ESDM.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat tersebut tercurah siang dan malam semoga kita menjadi insan-insan yang pandai akan mensyukuri nikmat-Nya amin ya *robbal'alamin*.

Setelah tadi dimulai dengan interupsi yaitu perihal tentang bantuan pasang baru listrik BPBL dan juga PJUTS, saya mau *me-refreshing* kembali begitu bahwa program BPBL ini kan program yang baik begitu, program yang mulia dan terus harus dikembangkan hal ini dan kedepankan kita mendorong apa itu *green* energi lah. Listrik ini sebagai andalan termasuk sektor transparan apa itu untuk terus dimaksimalkan gitu, dioptimalkanlah kurang lebih begitu dan masukan-masukan tadi hampir merata begitu Pak Dirjen, Pak Dirjen Listrik bahwa apa yang tadi saya disampaikan begitu sama juga itu realitas di lapangan begitu.

Dalam forum yang baik ini begitu Pimpinan, saya pikir perlu juga dari pihak kementerian, Dirjen ini untuk menunjuklah atau LO-lah begitu supaya dari dirjen itu kalau mungkin sibuk beliau, ada seseorang yang tugas ya di dalam *day to day* begitu untuk menjadi *license official*-lah supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik yang tidak terputus gitu. Bapak mungkin dapat wa buanyak itu ribuan, tapi ada khusus LO begitu yang ngurusin ini. Ya, jadi nanti di dalam rekomendasi atau kesimpulan perlu juga itu ditekankan Pimpinan, supaya nanti rapat minggu ke depan atau bulan ke depan masih hal yang sama begitu. Jadi saya tahu betul masukan-masukan tadi apa adanya itu, tidak ada yang dipelintir begitu, panas karena sudah mendekati mau pemilu ini Pak Dirjen, jadi agak cepat tersinggung kita.

Saya yang biasa tidak bicara juga, hari ini saya bicara begitu, ini yang perlu harus menjadi catatan kan tugas konstitusi itu begitu kita, selain kita mengawasi anggaran juga legislasi dan juga memperjuangkan harapan aspirasi rakyat yang diwakilinya, itu tugas kita begitu. Kalau kita tidak

perjuangkan dengan ngotot ini ya kita salah gitu, dicatat juga oleh rakyat gitu tidak gampang begitu, sudah begini pun, sudah berjuang dan menjalankan aspirasi dengan baik tahu-tahu dipotong di tikungan itu terjadi, jadi ini yang mengapa hal ini yang begitu kita *concern* tentang program-program yang baik ini, yang mulia ini, realitasnya selama kemerdekaan ini rakyat ratusan ribu yang belum mendapatkan listrik.

Tadi Ibu Ratna sampai memohon-mohon itu, biasanya kalau jawatimuran *cuk opo itu* kan gitu biasanya, saya terjemahkan artinya itu. Jadi ini harus menjadi catatan begitu supaya tidak sampai meledak atau sampai berdiri di meja kita ini, ini yang menjadi *concern* kami.

Juga tentang apa tadi LO perlu, penting begitu, jadi mereka akan menerima keluhan-keluhan dari para anggota.

Yang kedua, tentang BPJS ini juga hal yang luar biasa Pak Dirjen, program yang baik begitu karena realitasnya walaupun kami ini di Jawa, *sorry* isu yang panas juga, PJUTS. Ini saya terangkan ke Pak Dirjen dan seluruh kita semuanya, begitu bahagiannya rakyat itu. Mereka itu selama berpuluh tahun tidak ada aliran listrik, jadi kalau itu nyala Pak Dirjen mereka sore hari itu sudah berkumpul di bawah lampu itu sampai malam, bahkan ada TV di situ dan senang sekali. Inikan program yang bagus juga bisa mengurangi program Keluarga Berencana ini, kalau nggak ada hiburan kan nambah banyak itu apa putra-putra di daerah. Jadi ini program yang mendapatkan pahala begitu, jadi apa tentang kualitas juga tentang mekanismenya, tentang kadang-kadang juga ada perbedaan politik begitu, ada juga hal-hal yang juga harus apa bisa dipermudahlah begitu, jangan sampai karena perbedaan politik di kabupaten itu akhirnya lambat implementasinya.

Saya pikir juga pernah kita diskusikan dengan Pak Dirjen Listrik waktu itu tentang Undang-Undang Pemerintahan Desa, saya pikir itu juga salah satu solusi.

Selanjutnya yang juga untuk menjadi perhatian kita bersama begitu Pimpinan, mengapa serapan ini kok lambat? Padahal ini sudah semester atau mendekati semester, realisasi di dalam serapan. Yang menjadi pertanyaan *ono* duit nggak ini, ini juga perlu ditanyakan ini, ada uang nggak, ada dananya nggak ini dari kementerian terkait yang mempunyai tugas untuk merealisasikan mencairkan dana itu. Ini juga harus terbuka jadi kalau nggak ada ya kita bantulah cari dana kurang lebih begitu. Makanya dibentuklah Panja Pendapatan Penambahan Pendapatan Negara yang diketuai oleh Pak Maman.

Mungkin itu saja Pimpinan, apa yang menjadi poin-poin penting yang harapan kami bisa dimasukkan di dalam kesimpulan nanti, supaya setiap rapat kerja atau rapat dengar pendapat kita baca itu apa aja yang jadi keputusan hari ini kita bacakan supaya tidak dilupakan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu banyak di negeri ini.

Demikian, kurang lebih mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya selanjutnya oh ini nggak apa-apa lah kita kasih satu dulu tambahan nanti baru Ibu, kasihan Bu jauh-jauh dari Batak.

Silahkan Pak, dipersingkat saja Pak. Kalau tadi agak spesial Pak, karena wanita, Pak.

F-PD (HENDRIK SITOMPUL):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi VII serta Sekjen, Dirjen, Kepala BPSDM yang hadir di sini salam hormat dan kami banggakan.

Pertama, jujur saya kurang maksimal melahap dari paparan Bapak-bapak sekalian, izinkan nanti berikutnya kalau saya mengajukan pertanyaan secara tertulis Pak Sekjen, mungkin nggak bisa saya lahap semuanya pada kesempatan ini.

Berikutnya ini terkait dapil Pak Dirjen Gatrik sama Dirjen EBTKE ya, pertama terkait ganti rugi yang dibawah Sutet itu Pak, jaringan Sutet itu. Itu sekarang masih banyak kendala di penggantian kompensasinya Pak karena katanya ini tergantung pada di kementerian tentang penggantian, contohnya ada di salah satu daerah Dapil saya Pak. PLN tidak bisa melakukan pemotongan pohon gitu karena pihak masyarakat tidak mau dilakukan pemotongan karena minta ganti rugi lagi Pak, minta ganti rugi lagi terhadap pohon-pohon yang dibawah jaringan tersebut.

Dan juga yang kedua ada juga di daerah kita juga pergantiannya maunya seperti dulu, artinya kayak Asahan 3 gitu, Pak. Jadi mereka maunya pergantian itu di bawah itu semua digantikan, ganti rugi. Jadi saya mohon penjelasan dari kementerian khususnya Dirjen Gatrik apakah di EBTKE, apakah ada kebijakan khusus terhadap pergantian-pergantian terhadap pohon-pohon dan apa yang ada di bawah jaringan-jaringan dari sutet tersebut Pak.

Yang kedua, di daerah Sumut 1 *over supply* Pak, listrik. Yang saya melihat dapatkan bahwa pembangkit PLN sendiri itu yang di-off-kan Pak, ya saya nggak tahu punya apa ini. Apakah pihak Dirjen Gatrik tahu ini ataupun Pak EBTKE apakah tahu ini, kenapa pembangkit PLN sendiri yang di-off-kan justru yang mitra itu yang dihidupkan, ini saya nggak tahu. Inikan lebih bagus sebenarnya kalau saya milik PLN yang dihidupkan, itu yang mohon penjelasannya.

Terus yang terakhir Pak, ada program-program di ESDM terkait pelayanan publik fisik maupun nonfisik. Mohon penjelasan Pak, apakah program-program fisik dan nonfisik ini yang terkait dengan mitra Komisi VII ini mohon penjelasan, semakin banyak semakin baik saya bisa bawa ke dapil.

Oh satu lagi Pak terakhir sekali, boleh nggak saya mendapatkan program-program ESDM itu yang ada di dapil kami Pak, Sumut 1, apa yang sudah terjadi dan akan dilakukan kegiatan-kegiatan ESDM di dapil kami.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak atas masukan dan komentarnya.

Selanjutnya dari PKS, *monggo* Bu dipersilaken.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi VII. Pak Sekjen dan Pak Dirjen serta seluruh jajarannya.

Tentunya ini adalah forum di mana kita mencoba untuk melakukan evaluasi agar ke depan itu bisa lebih baik lagi. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yang pertama ini terkait dengan *automatic adjustment*. *Automatic adjustment* ini tadi saya coba konfirmasi kepada teman yang di Banggar yang ditetapkan itu adalah angka. Adapun apa kemudian program yang dipilih itu adalah menjadi kewenangan kementerian. Ada beberapa hal terkait dengan *automatic adjustment* ini, yang pertama terkait dengan program pipa transmisi *cisem*. Disebutkan di sini ditunda karena berdasarkan temuan BPKP, boleh kami tahu apa temuannya Pak? Apa hasil *review* BPKP itu, sehingga program *cisem* ini ditunda karena kita juga menurut saya perlu tahu tentang temuannya itu apa.

Yang kedua, ketika kemudian memang ini dipilih untuk ditunda di sini ya, di *block* dilakukan *self block* kemudian kan ada nih yang lain-lainnya gitu ya. Di sini di paparan yang awal, paparan yang umum disampaikan bahwa diantaranya dari sini bisa menghidupkan kembali konkrit nelayan dan juga dilakukan modernisasi peralatan mitigasi bencana geologi sebesar 36,7 miliar. Saya ingin mendapatkan penjelasan Pak, mengapa ini yang dipilih, mengapa misalnya yang dipilih itu untuk di-*hold* misalnya BPBL. BPBL yang sebelumnya direncanakan 80.000 kemudian dialokasikan cuma 40.000, nah ini kenapa yang BPBL inilah yang *hold* di 60 miliar itu, kenapa lebih dipilih modernisasi peralatan mitigasi atau kenapa yang di-*hold* itu misalkan yang PLTS atap,

alasanya apa gitu, kenapa memilih program A men-*drop* B, nah itu menurut saya ini harus ada *reasoning*, kenapa itu yang dipilih itu sebab kalau berkaitan dengan masyarakat saya yakin tadi dengan BPBL ini sangat banyak ditunggu oleh masyarakat.

Yang selanjutnya, terkait dengan rasio elektrifikasi, ini saya juga menyambung apa yang sampaikan Mbak Ratna tadi ya. Pak Rida kita juga pernah diskusi dengan klaim rasio elektrifikasi 99% tersebut dan selalu di, kalau saya tidak salah tangkap waktu itu dijelaskan, iya karena itu kan tidak, tidak tergantung yang bersumber pada PLN saja. Bisa nggak dapat gambaran komposisi 99,5% rasio elektrifikasi itu berapa persen sih sebetulnya yang disokong oleh PLN, berapa persen yang oleh sumber daya yang lain itu. Yang disebut dengan PLN itu adalah sumber daya yang lain itu seperti apa? Karena kan di negara kita ini yang melaksanakan transmisi dan distribusi kepada pemakai itu hanya PLN kan. Ini kami ingin mendapatkan penjelasan lebih detail di *breakdown* dari rasio elektrifikasi yang diklaim 99,5% itu.

Kemudian juga ini terkait dengan komunikasi, jadi saya menguatkan lagi yang disampaikan sama teman-teman Pak, ini ibarat kita datang ke restoran, ke rumah makan lalu disodori buku menu, kita berasumsi semua ada kan gitu ya kalau disodori buku menu. Lalu kita udah pesen segala macam, diterima lama nunggu sejam, baru kemudian *waiter*-nya datang lagi ini habis, ini habis jadi karena tidak adanya komunikasi gitu. Kenapa kemudian misalnya ada masalah, masalah apa? Jangan sampai kami itu hanya mendapatkan hasil akhir saja, ini gagal, kenapa gagalnya, kenapa tidak diberitahu pada saat proses validasi, pada saat di awal, sehingga kita juga bisa memitigasi semua itu dengan masyarakat ya. Ini buat saya pribadi Pak, bukan sekedar semata-mata ini pertanggungjawaban kami yang memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi yang tidak bisa dibayar itu kekecewaan mereka, Pak. Harapan itu yang kemudian terhempas nunggu lama lagi ya tadi karena ternyata sebuah kesalahan yang dari awal sesungguhnya sudah bisa dikomunikasikan. Jadi jangan biarkan PHP itu Pak, udah nunggu, udah apa disangkanya lancar-lancar aja, ujung-ujungnya ternyata nggak bisa padahal ada kendala yang semestinya bisa diantisipasi di depan.

Ini juga menurut saya perlu diantisipasi nanti terkait juga dengan program konkrit nelayan, program PJUTS dan lain-lain, itu jadi semua program-program tersebut hendaklah kita bangun komunikasi dengan lebih baik lagi.

Itu saja dari saya Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terakhir dari Bu Andi Juliani yang paling Paris.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Terima kasih, Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa syukurilah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah *subhanahu wa taala*, sehingga kita bisa hadir di sini.

Yang saya hormati Ketua, Pak Maman seluruh Anggota Komisi VII, Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta jajarannya.

Saya bisa izin Pak, kalau yang dari sekjen siapa saja ya di sini selain Pak Sekjen, bisa angkat tangannya nggak, dari Migas siapa aja Migas.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA):

Migas minta pengunduran waktunya Bu untuk hari, kalau nggak salah hari Rabu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Oke, EBTKE, Gatrik oke.

Jadi saya mulai pendahuluan dulu nih Pak, jadi kalau Pak Maman tuh banyak tuh videonya yang viral Pak Maman ya. Nah, salah satu juga hal yang pernah saya sampaikan dari tahun ke tahun begitu banyak dari Kementerian ESDM ini yang 287 miliar tahun sebelumnya untuk rekomendasi, kebijakan, studi dan berkali-kali saya minta kirim hasilnya, apa yang sudah dilakukan, rekomendasinya apa ya, kemudian kebijakan apa yang sudah dikeluarkan terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, misalnya untuk yang Maluku kebijakan apa yang sudah diambil, itukan ada uangnya yang sudah Bapak minta yang totalnya 287 miliar. Studi apa? Karena rapat hari ini Pak Sekjen dan Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya adalah mengevaluasi dalam rangka sesuai dengan Undang-undang Dasar fungsi kami sebagai Anggota DPR adalah fungsi pengawasan. Mengawasi pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Nah, saya tidak melihat di dalam laporan progres ini yang terkait dengan rekomendasi, kebijakan, studi tidak ada hasilnya. Padahal saya berkali-kali saya minta tolong, pernah satu kali saya dikasih 1 tahun lalu bahan studinya Dirjen Minerba waktu itu belum final masih banyak garis-garis merahnya, saya baca tuh. Tolong ini diseriusi, ini uang negara Pak, uang rakyat, kita nggak main-main ya. Saya tadi melalui TV Parlemen saya katakan, Pak Jokowi tolong panggil menteri-menterinya, lihat struktur anggaran APBN lebih banyak untuk internal apa untuk rakyat? Kelihatannya memang Kementerian ESDM ini mohon maaf ya Pak, ketika dia anggaran untuk rakyat itu ya nggak pedulilah mau dibintangin kek atau mau di apa nggak berjuang.

Saya mulai nih misalnya juga, inefisiensi banyak terjadi juga di Kementerian ESDM, di setiap Direktorat Jenderal, di sekjen ada layanan

hukum ya, kemudian ada pemeliharaan kantor di masing-masing sekjen, di dirjen kenapa pemeliharaan kantor nggak satu aja programnya Kesekjenan. Kemudian untuk layanan SDM ya sudah untuk saja di BPSDM atau di sekjen, jangan di setiap dirjen ada layanan SDM, layanan SDM. Kemudian layanan hukum ada di semua di Sekjen ESDM, di dirjen ada layanan hukum ya, kemudian di sekjen saya juga ada mempertanyakan nanti ada beberapa izin Pak Ketua, saya mau meminta juga interaktif langsung dijawab supaya kita dengar semua karena ini kan *live* ya. Nah, misalnya ada layanan prasarana internal, ada juga belanja barang untuk kantor, pemeliharaan kantor saja di sekjen itu 84,3 miliar sedangkan untuk masyarakat pasang listrik, meteran listrik gratis itu hanya 120 miliar Pak Ketua, 84,3 miliar itu anggaran kantor belanja di kantor untuk pemeliharaan kantor 84,3 miliar. Belanja barang sekjen saja itu 200,3 miliar, belanja barang kesekjenan saja di bawah kesekjenan tuh 200,3 miliar, pemeliharaan kantor 84,3 miliar. Ini supaya rakyat tahu bahwa ternyata program untuk rakyat saja kita PJUTS saja kita harus berjuang nambah-nambah, minta-minta sedikit demi sedikit.

Kemudian meteran listrik gratis 120 miliar hampir hanya setengah dari belanja barang di SDM ya. Itu kalau saya bedah satu-satu di Kesekjenan Pak ya, termasuk layanan hukum yang kalau dikumpul-kumpul itu nanti saya mau hitung tuh berapa layanan hukum di masing-masing dari sekjen, dirjen ini, dirjen ini, banyak dan apa hasilnya. Kemudian jadi intinya kelembagaan itu, itu harus fungsional ramping di tengah kondisi saat ini.

Kemudian saya juga ingin bertanya Pak Dirjen EBTKE, itu untuk PLTS atap Pak yang 108 mungkin nggak itu buat dibagikan ke dapil-dapil anggota, mungkin iya atau tidak Pak, jawab saja Pak.

Saya izin interaktif Pak Ketua.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI:

Tadi juga sudah ada pertanyaan Bu dari Ibu Mercy, mungkin nanti saya jawab sekaligus.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nggak, sekarang jawab Pak, iya atau tidak.

DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI (DADAN KUSDIANA):

Mungkin jawabannya tidak bisa ya atau tidak ya Pak Ketua, mungkin saya izin menjelaskan.

Terima kasih, terkait dengan PLTS atap, ini sebetulnya kegiatan yang sudah tertunda 2 tahun Pak, karena terkena *refocusing*. Jadi usulannya memang diawali dengan usulan-usulan dari, umumnya dari Pemda, Pak. Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan studi kelayakan ke lapangan, terakhir anggaran terakhir itu ada di 2021. Kemudian ini terkena *refocusing*,

kemudian sekarang kami alokasikan lagi anggaran untuk melanjutkan apa yang sudah dulu udah sama-sama disepakati untuk dilakukan.

Demikian Pak.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Artinya Pak, kalau alasannya itu terlalu klise Pak, izin Pak Ketua. Kan seharusnya kalau memang tertunda, tapi kan pelaksanaannya baru sekarang. Artinya memang seperti yang dikatakan oleh Bu Ratna tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Kementerian ESDM kita, selain di Banggar, kami juga di komisi dulu sepakat untuk memperjuangkan anggaran. Tapi yang terkait dengan masyarakat di dapil itu, khususnya di dapil Anggota Komisi VII itu kurang menjadi perhatian penting, Pak. Ini catatan karena rapat hari ini akan menentukan seberapa porsi anggaran untuk Bapak-bapak nanti di 2023 yah.

Nah, contohnya juga Pak PJUTS 20.000, di sini ada Pimpinan, ada kapoksi, ada anggota tapi cuman 15.000, kapoksi-anggota sama juga. Kalau saya nanya tadi, oke Pimpinan mungkin lah harus lebih lah tapi kalau 20.000, 5.000-nya ke mana gitu loh Pak. Jadi jangan sampai Pak, lebih banyak ya, ya nggak lebih banyak sih, sepertiga itu keluar ya. Kalau memang Bapak pasnya cuman hanya untuk Anggota dan Pimpinan di Komisi VII nanti kita 2023 kasih segitu aja, 15.000-16.000. Ini kan rapat hari ini saya katakan kita *setting* ini rapat hari ini adalah untuk mengevaluasi apa yang Bapak-bapak dan Ibu lakukan di 2022 dan untuk kita tentukan apa yang harus kita perjuangkan anggaran dan tidak kita perjuangkan di 2023.

Kemudian, di EBT juga banyak kegiatan kegiatan promosi ya yang tadi sebenarnya banyak teman-teman itu minta kita sosialisasi lah bersama. Ada komik, bahan promosi aneka komik, kemudian buku panduan, segala macam, sosialisasi atas nama bentuknya 300 juta ya kalau nggak salah, bukan soal uangnya Pak, tapi kita duduk bersamalah. Kita akan jeli Pak Pimpinan 2023 kita akan lihat satu-satu dari 2022 ini apa sih yang efektif gitu loh. Kita nggak, saya sudah katakan anggaran Bapak-bapak itu kan dibayar dari pajak rakyat. Kita makan di *kentucky* aja itu udah berapa bayar pajak, beli es krim saja Pak, saya kumpulin tuh struk-struknya satu-satu, saya mau bikin analisa berapa setiap hari itu rakyat itu membayar pajak dari dia beli makanan dan itu kan yang digunakan oleh kita semua ya.

Nah, saya BPSDM nih Pak, waktu dulu Pak Ketua kita dijanjikan nanti saat kita bahas anggaran 2022 nanti banyak dilakukan di dapil diklat dengan masyarakat, tapi nggak ada tuh sampai hari ini, nggak ada komunikasi. Saya perlu catatan, diklat masyarakat bidang tambang bawah 300 peserta, semua punya Bapak, ini sudah saya print sendiri, saya kasih ke umum semua. Ini kan harusnya bisa melibatkan masyarakat tidak semua dapil, tetapi masyarakat dapil yang punya tambang ya. Kemudian, layanan pendidikan pelatihan di sini ya oke ini masih dukungan manajemen untuk di Satker Sekretaris Jenderal.

Terus kemudian pelatihan masyarakat bidang kelistrikan dan EBTKE 250 orang, di mana itu, kan harusnya paling bagus paling itu adalah di daerah-daerah yang pernah kita berikan EBT PJUTS. Pelatihan industri bidang ketenagalistrikan dan EBTKE, ini kita harus duduk bersama Pak Ketua, karena kita bermitra juga dengan Kementerian Perindustrian. Ada paket-paket pelatihan bidang ketenagalistrikan juga kita lakukan, tapi kan ini harusnya dilakukan dengan masyarakat, jangan Bapak lakukan sendiri, tiba-tiba habis dananya gitu loh. Kalau memang Bapak tidak mau melakukan program ini dengan kami di Komisi VII, tahun depan nggak usah ada anggaran ini, gak usah, nggak jelas kok, Bapak melakukan apa dan di mana.

Sertifikasi kompetensi tenaga listrik bidang ketenagalistrikan dan EBTKE, nah harusnya kita nih meningkatkan kemampuan-kemampuan masyarakat seperti yang kita lakukan dengan Kementerian Perindustrian kita cari pesertanya sesuai dengan syarat-syarat yang diminta, pelatihannya apa misalnya soal elektronik kita cari dan disiapkan nanti mereka bekerja ...*(suara tidak jelas)*... masyarakat.

Dan terakhir saya setuju dengan Pak Ketua tadi, untuk geothermal ini dalam Undang-Undang Migas Pak kita memang harus masukkan saja di SKK Migas karena saya lihat Kementerian ESDM ini sudah *overload* ya, contohnya jawabannya Pak Rida ketika saya tanya, harusnya kan yang sudah NIK-nya *double* kami dikasih *feedback*, dikasih pink warnanya, yang sudah oke dikasih hijau. Katanya kami kekurangan tenaga kerja, berapa staf di Ditjen Gatrik Pak Dirjen? Pak Dirjen di Gatrik berapa orang?

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

300-an Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

300, kami ini 1 orang Pak sendiri melayani 9 kabupaten kota dengan segala aneka permasalahan, 300 orang nggak bisa ngurusin itu, itu depan laptop aja satu orang 1 pegang yang punya Bu Mercy, pegang Pak Ketua, pegang ini, satu orang 1 bagi itu kasih warna semua. Kan Bapak/Ibu di gaji oleh negara dan itu pekerjaan pokok karena melayani masyarakat Pak, melayani masyarakat. Saya minta dalam waktu 3 hari saya minta warna pink dan warna hijau semua data yang sudah saya berikan, supaya saya bisa memberikan *feedback* ke masyarakat, ke semua anggota juga diperlakukan seperti itu. Bapak ini kan semua digaji dengan uang negara kok, seperti kami juga, kami ini sendiri melayani masyarakat. Makanya saya setuju tadi Pak Ketua bilang, ini jangan main-main kalau 1-2 kali kita bicara.

Jadi ini tolong nanti kita akan perhatikan bener apa yang kita setuju dengan Bapak-bapak di anggaran 2023. Kalau Bapak main-main soal diklat masyarakat ya, soal yang harus di beri bintang Bapak, Pak Sekjen, Pak Dirjen harus berjuang tuh jangan sampai di bintang itu meteran listrik karena data kan sudah masuk dan memang ini Pak Sekjen dan semua Dirjen, Kementerian

ESDM ini paling memusingkan soal walaupun tidak ada Dirjen Migas. *Converter* sebentar 30.000, sebentar 20.000 tiba-tiba bikin *meeting* dengan semua Kepala Dinas tiba-tiba turun lagi 20.000, berubah-ubah itu data, lumayan saya nggak tidur menyeleksi data satu-satu yang mana saya harus buang, yang mana saya harus buang, harusnya dari awal itu disampaikan. Kalau memang syaratnya seperti ini ditentukan dulu sekian, jangan tiba-tiba syarat berubah-ubah Pak. Jadi Bapak-bapak ini kayaknya harus sekali-sekali 1 bulan ya 1 orang itu ke lapangan sehingga tahu tinggal bagaimana susahnyanya kami itu di dapil, Pak.

Ini mungkin saya ingin sampaikan, intinya Pak saya minta tadi ke PR ke Dirjen Gatrik. Saya minta PR juga kepada BPSDM terkait dengan diklat-diklat masyarakat. Kemudian saya juga minta jawaban PR terkait juga dengan Dirjen Gatrik sudah ya, EBT sudah dengan BPSDM. Ini PR, Bapak punya 300 staf ya, kalau kami dikasih PR kami cuman punya 5 tenaga ahli. Jadi silakan dalam waktu 3 hari Bapak siapkan sebelum kita membahas anggaran 2023.

Terima kasih Pimpinan.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Begini Pak, ini kan kalau saya lihat banyak sekali tanggapan terkait realisasi maupun anggaran yang 2022. Saya mohon izin Pak Pimpinan forum kalau kita skors 30 menit, kita nanti bicara di ruang pimpinan lebih detail gimana, boleh ya, biar lebih.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

1 menit Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh ya silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

PAN ini kayaknya sejak bergabung bersama-sama di KIB kayaknya lebih mantap.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati.
Pak Sekjen dan jajaran Dirjen Kementerian ESDM yang kami hormati.

Pertama, bahwa peran *budgeting* yang diberikan oleh, yang kita sepakati antara pemerintah dan DPR Pak Sekjen, dari masing-masing kementerian, Dirjen Gatrik, Dirjen EBTKE dan BPSDM ini, politik anggarannya adalah politik keberpihakan. Keberpihakan terhadap ketersediaan penerangan khususnya listrik termasuk EBTKE yang akan menuju *zero emission*. Heran saya dalam melepas dan menyerap, penyerapan-penyerapan anggaran itu di bulan Juni saja baru, Mei ya ini baru 26%. Kira-kira apa penyebabnya Pak, apa yang sulit dan menyulitkan di dalam penyerapan anggaran ini. Politik pembiaran, itu sering terjadi di seluruh kementerian, nanti di akhir-akhir tahun anggaran ini baru tergopoh-gopoh, tergesa-gesa melepas anggaran yang nanti pada akhirnya kualitas kerjaan, kualitas produk dan sebagainya itu tidak memenuhi spek atau itu sebaliknya politik anggaran ini memang melakukan di ujung-ujung itu ada skenario apa, patut curiga dan kami juga merasa mencurigai itu, itu satu.

Yang kedua Pak, Pak Sekjen, saya ke Pak Sekjen saja. Kenapa tidak di awal tahun, kenapa tidak di awal tahun ini dilakukan tender, bahkan kami melihat ada beberapa dirjen, saya memberikan apresiasi lah kepada Kementerian Perindustrian itu November sudah tender Pak, November sudah tender. Program-program kemasyarakatan itu di Maret sudah di lansir, bahkan di Februari sudah berjalan. Nah, ini keberpihakan mana politik anggaran yang Pak Sekjen sebagai kuasa pemegang anggaran ini lakukan. Saya nggak paham Pak, nggak paham karena hampir 80% tuh karena keberpihakan untuk menuju elektrifikasi daripada Republik kita ini, apalagi di daerah-daerah 3T, kan sangat sulit Pak kalau memang dilakukan itu di penghujung tahun anggaran.

Saya memberikan catatan ini kepada Pimpinan, saya mau kalau politik anggaran kira 2023 ke depan itu November sudah ditender Pak, kami membutuhkan itu. 2023 itu masuk tahun politik itu November kami minta sudah ditender, jangan di penghujung tahun ya baru ini dicoba dilepas pelan-pelan.

Dan yang ketiga, seiring apa yang dikatakan Pak Maman tadi terhadap, sayang Pak Dirjen EBTKE nggak hadir kemarin dengan Sorik Merapi Geothermal kemarin Pak ya. Ini ya paling tidak harus bagaimana penyelesaiannya karena yang sudah ada *existing* 90 megawatt untuk menuju 140 megawatt, ini Bapak harus berpikir dengan baik ini ya, berpikir agar ini ada solusi yang Bapak berikan kepada DPR.

Dan yang terakhir saya menyetujui dari mulai Bu Mercy, Ibu Andi, Ibu Ratna Juwita sepenuhnya kami mendukung itu semua terdapat persoalan di dapil kami juga. Saya sepekat untuk di skor ya, kita lakukan pembicaraan lebih lanjut.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, terima kasih Pak Nasril.

Cukup ya jadi saya pikir kita skors dulu 30 menit, jadi ada yang sholat dengan tenang pikiran dulu, adem-adem ya kan, kalau ada yang mau makan habis itu baru kita bicara nanti, gitu ya. Jadi rapat pembahasan realisasi anggaran dengan Kementerian ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan, Sekjen ESDM, Dirjen EBTKE dan Kepala BPSDM kita skors 30 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIB)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera.

Dengan ini saya buka kembali skorsing rapat yang sangat luar biasa melelahkan.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 15.45 WIB)

Bapak/ Ibu Anggota Komisi VII dan Kementerian ESDM.

Terima kasih banyak tadi kita udah banyak ya forum lobi-lobilah tadi menemukan satu titik kesepahaman, nanti saya pikir kita nggak usah lagi ada pembahasan kita langsung masuk ke kesimpulan aja karena tadi udah panjang sekali diskusi kita. Tapi ada satu hal sebetulnya yang menjadi *highlight* besar bahwa Kementerian ESDM menyampaikan bahwa terkait ada kebijakan dari Kementerian Keuangan mengenai *automatic adjustment* betul Pak ya, bahwa ada kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan *automatic adjustment* yang notabene kurang lebih sekitar 500 miliaran.

Pada prinsipnya, kami Komisi VII bisa memahami, mengerti dan sangat bisa memahamilah apa yang memang menjadi penyampaian dari Kementerian ESDM. Secara prinsip kita tidak ada masalah, namun ada satu hal ingin yang menjadi penekanan kita karena yang namanya *automatic adjustment* ini bukan pengurangan anggaran betul ya? Itu dulu, jadi kita simpulkan dulu bahwa yang namanya *automatic adjustment* ini ada istilah bahasa baru yang sebenarnya me-mending dululah kan begitu, tapi bukan menghilangkan anggaran. Dikarenakan ini sebetulnya bukan untuk menghilangkan anggaran, maka dari itu ada 2 program yaitu program meteran listrik dan program PLTS atap yang

tadi awalnya diusulkan untuk dimasukkan dalam *automatic adjustment* akhirnya kami bersepakat tadi yang 2 program ini karena ini untuk masyarakat untuk rakyat itu jangan dulu kita tunda. Jadi segera saja direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang ada, jadi silakan nanti Kementerian ESDM menyisir-nyisir mana yang memang nanti dimasukkan dalam *authometric adjustment*. Jadi saya pikir dari 500-an M itu kita hanya minta 80 miliaran yang terkait program ke masyarakat langsung jangan masuk, jangan ditunda-tunda lagi lah. Jadi silakan saja walaupun memang mau ditunda program-program yang lain saja, yang toh juga ini kan bukan pemotongan anggaran tapi lebih kepada menunda sementara, saya pikir itu ya.

Lalu yang kedua, terkait beberapa program-program PJUTS yang mungkin ada kendala secara teknis di kabupaten masing-masing, kita mendorong agar Kementerian ESDM bisa mencari formulasi perizinan dan persetujuan lain tanpa harus menunggu persetujuan dari tingkatan kabupaten karena kita nggak mau polemik dinamika di bawah jadi justru menghambat masyarakat untuk bisa mendapatkan kesempatan program-program yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian ESDM dan teman-teman Komisi VII.

Dan yang terakhir yang ketiga tadi kurang lebih program BPSDM itu Pak, kita akhirnya baru tahu tadi bahwa selama ini program BPSDM terkait program-program pelatihan ke peningkatan keahlian, *skill* pekerja yang ada di sektor Kementerian ESDM itu ternyata berkoordinasinya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Pada prinsipnya kita bisa mengerti, namun ke depan kita mengusulkan karena ini sifatnya teknis sekali dan Tupoksi pelatihan dan juga isu-isunya terkait mengenai energi sumber daya mineral, kita menyarankan agar Kementerian ESDM ke depan bisa berkoordinasinya biar *inline* dengan Dinas ESDM dan Perindustrian yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Saya pikir itu tadilah kurang lebih secara ini dan realisasi-realisisasi program terkait mengenai berapa serapan dan lain sebagainya, kita menghimbau kepada Kementerian ESDM untuk segera meningkatkan daya serap anggaran yang ada di Kementerian ESDM.

Saya pikir itu ya kurang lebih tadi pembahasan kita secara umum, nanti ini juga waktu sudah hampir jam 4 sore. Kita masuk ke kesimpulan, silakan nanti mohon yang berwajib Ibu-ibu, emak-emak yang sangat luar biasa ceriwis untuk bisa me-*review* kesimpulan kita.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kesekjenan, Dirjen Energi Baru Terbarukan, Dirjen Ketenagalistrikan, Kepala BPSDM Kementerian ESDM, 6 Juni 2022.

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekjen Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan program yang berkaitan dengan masyarakat, seperti bantuan pasang baru listrik.

Saya pikir.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dan PLTS atap.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Langsung ditambahkan di poin ini Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dan PLTS atap dalam realisasi anggaran tahun anggaran, saya kira tahun ajaran, maklum saya sekarang status nya udah mahasiswa Pak, jadi tahun anggaran 2022, atau dalam realisasi tahun 2022, titik, gitu ya. Dan tidak memasukkannya ke dalam *automatic adjustment* tahun anggaran, oh ya itu yang tahun anggaran 2022, koma dan tidak memasukkannya ke dalam *automatic adjustment*, nggak usah pake anggaran lagi kali ya, ya nggak usah pakai. Maksudnya *automatic adjustment* tahun anggaran 2022, oke setuju ya?.

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI mendorong seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk dapat lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI dalam hal pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022, termasuk perencanaan revisi peraturan yang membatasi dan kendala-kendala yang dihadapi, khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Nggak usah pakai yang dilaksanakan masyarakat di daerah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, kalau boleh inikan sebenarnya berangkat dari hasil evaluasi kita dan ya kalau saya harus bilang kritikan kitalah kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di kementerian, untuk kegiatan itu juga melibatkan Anggota DPR di lapangan di tingkat lokal. Jadi mungkin bahasanya bukan, untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII dalam pelaksanaan program kegiatan, langsung konkrit. Kita gempur setengah mati di sini begitu yang hadir bupati yang benderanya beda dan kemudian mengklaim bahwa itu program kerja mereka, kita sakit Pak, kita sakitnya tuh di sini.

Jadi tolong Pak, kita udah nggak main, nggak *cawe-cawe*, kita ini cuman satu aja begitu kita turun kita bisa mengatakan bahwa inilah yang kita perjuangkan bagi masyarakat, itu aja nggak ada yang lain, Bapak-bapak nggak

usah sibuk dengan yang lain-lain. Oke melibatkan Komisi VII dalam pelaksanaan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu *the power of* emak-emak Pak agak berat, Bapak aja yang sebulan sekali ketemu aja pusing apalagi kami Pak, tapi saya cinta mereka, Pak.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua kalau saya boleh usul, selain program-program yang beririsan langsung dengan APBN 2022 ini tetapi program-program kemitraan Dirjen Kelistrikan misalnya dengan PLN. Kita jungkir balik, apa gebrak meja berkali-kali begitu mau COD, baru saja kemarin saya diundang untuk yang BNPT. Begitu COD misalnya satu pembangkit di Tual atau dimana kita nggak di undang, tiba-tiba kita cuman baca lewat media oh PLTN di Tual sudah jalan, oh pembangkit listrik mesin-mesinnya udah datang, bupatinya yang hadir dan mereka sudah melaksanakan. Aduh tuh sakit Pak, jadi tolong Pak nanti kalau ada COD-COD pembangkit-pembangkit yang lain saya mau datang Pak. Jadi masyarakat tahu bahwa kita bekerja sungguh-sungguh urus rakyat.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin, Mbak Mercy, bahasanya bukan tolong, harus. Saya pikir, nah ini tolong menjadi catatan bersama Pak, bukan ini bukan bermaksud. Saya nggak bermaksud mau membela teman-teman Komisi VII, ini kan bentuk pengapresiasian atas upaya dan perjuangan seseorang, mereka juga. Satu catatan kita kan nggak ada juga yang aneh-aneh juga, yang main-main inilah, itulah nggak ada kok. Jadi tolong dipahami betul-betul dan ini saya pikir harus melibatkan teman-teman Komisi VII karena pada akhirnya yang memperjuangkan seluruh isu terkait energi ini kan kita ini di VII.

Saya pikir itu ya, silakan dilanjut Mbak Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi saya kira itu catatan kritis untuk Kementerian dengan BUMN terkait tapi kan ini kan kerjanya kan beririsan semua, hadir dari kementerian kok kita yang punya dapil yang ada di Komisi VII nggak hadir, haduh ribut besar terjadi di Facebook, terjadi di mana-mana berkaitan dengan beberapa peresmian-peresmian dan kita karena dilibatkan mereka menganggap kita nggak bekerja. Padahal bupati dari Morotai yang baru saja selesai itu sampai telepon dan wa Bu Mercy terima kasih karena mereka tahu bahwa kita bekerja, mengurus bukan cuma Maluku tapi Maluku Utara.

Jadi ini catatan kecil aja kepada Bapak-bapak untuk kita nggak minta macam-macam ya, ini yang kayak begini mestinya tanpa kita bilang ada kesadaran bersama dari Bapak-bapak bahwa kita berjuang bersama-sama

kok, sehari-hari rapat berminggu-minggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan apa saja yang berkaitan dengan Kementerian ESDM.

Saya kira itu Pak Ketua catatan untuk poin 2.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cukup ya, jadi redaksinya saya ulangi.

Komisi VII DPR RI mendorong seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi dan harus melibatkan Komisi VII DPRRI dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2022 termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi dan kendala-kendala yang dihadapi, khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Cukup ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Sebentar, sebentar, dihadapi koma sebelum khusus implementasi program di lapangan dan implementasi program di lapangan, khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke cocok, nambah lagi.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Kata-kata melibatkan ini kan nanti seolah-olah kita masuk di dalam *day to day*-lah gitu. Tapi bagaimana supaya tidak menjadi suatu masalah gitu ya, dipelintir lah gitu, seolah-olah harus melibatkan itu kan berarti kan kita sampai berpikir teknis gitu. Itu coba ada hal yang pas begitu Pimpinan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Menurut saya nggak ada masalah Pak kata melibatkan, ini tanggung jawab konstitusi kok dalam undang-undang kita dijamin. Fungsi konstitusional kita ada di sana.

Ya, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cukup ya, saya pikir nggak masalah Pak, nggak apa-apa dan bukan kata tapi nggak perlu pakai kata haruslah itu, mungkin dan melibatkan Komisi VII, mungkin itu kali.

Cocok? Bijak saya hari ini.

(RAPAT : SETUJU)

Lanjut poin ketiga

3. Komisi VII DPR RI mendesak seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien termasuk dengan melakukan proses tender pelaksana program lebih awal.

Bagaimana poin nomor 3?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mencermati apa yang tadi disampaikan oleh adik kita dari Ibu Ina dari Papua. Berkaitan dengan masalah ini Pak Ketua, mendesak seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien, termasuk dengan melaksanakan proses tender pelaksanaan, proses tender pelaksanaan program, proses tender koma pelaksanaan program, pelaksanaan program, lebih awal koma pelaksanaan program agar lebih awal dapat diimplementasikan dengan ya saya tidak tahu ya apakah ini bisa disetujui oleh teman-teman sekalian, dengan memberikan prioritas kepada daerah-daerah 3T karena ini daerah-daerah yang sulit, terluar, terisolasi kadang-kadang daerah yang terdepan, daerah yang terdekat diselesaikan duluan ya. Terima kasih.

Mantul. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Komisi VII DPR RI mendesak Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien, termasuk dengan melakukan proses tender pelaksanaan program lebih awal dengan memprioritaskan daerah 3T.

Setuju ya? Bapak *oke-oke* saja, kayak setuju atau pasrah Pak.

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk segera menyediakan pembangkit listrik sesuai

dengan perencanaan ketersediaan sebaran gardu induk, gardu transmisi dan gardu distribusi di wilayah Maluku, Maluku Utara dan daerah 3T lainnya, seperti Papua, Papua Barat dan Kalimantan dan wilayah Kalimantan yang di perbatasan, yang terletak di daerah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau Kalimantan perbatasan aja langsung.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Di wilayah Kalimantan aja nggak usah pakai perbatasan.

Oke, cocok? apa Kalimantan nya mau didetailkan lagi satu-persatu.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Pak Ketua, interupsi Pak.

Ini intinya sih semangatnya kami tangkap Pak, hanya saja saya terganggu dengan terminologi menyediakan, seolah-olah kami yang membeli atau men-tender-kannya sedangkan kan yang fungsi kami kan mengawasi eksekutornya, dalam hal ini PLN Pak. Mohon dimengerti mungkin kami untuk terus senantiasa melakukan pemantauan pengadaan yang dilakukan oleh PLN.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Apa Pak.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Pemantauan pengadaan, Pak, di sana.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Redaksinya bagaimana Pak.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau mungkin kalau saya boleh usul, jangan pemantauan pengadaan, pemantauan percepatan pengadaan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, untuk.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Percepatan pengadaan dengan pihak PT PLN persero.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pengadaan pembangkit listrik dengan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST.):

Pembangkit listrik dengan PT Persero PLN yang sesuai dan seterusnya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, setuju ya, ada lagi Pak? Cukup, Pak.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI mendorong Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI memprioritaskan pelaksanaan program PJUTS di daerah 3T termasuk dengan meningkatkan pengawasan kinerja kontraktor di lapangan dan mempermudah proses persyaratan untuk masyarakat penerima manfaat dari program tersebut.

Bisa nggak nih ditambahkan dari sisi kualitas juga, di daerah 3T. Saya pikir nggak usah masuk daerah 3T lah ini, kesannya kayak daerah 3T kali kita ini. Memprioritaskan pelaksanaan PJUTS tahun anggaran 2022 ya dan kualitas mutu ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Ketua, mungkin termasuk dengan meningkatkan pengawasan kinerja kontraktor di lapangan dan meningkatkan kualitas mutu produk, gitu loh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Meningkatkan kualitas mutu produk.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Iya soalnya kalau meningkatkan kualitas mutu saja apa nih yang mau di-ini-kan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sip ya serta mempermudah proses persyaratan untuk masyarakat penerima manfaat dari program tersebut, *oke?*

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, coba siapa tahu di poin 6 itu udah masuk saya nggak tahu. Ini berkaitan dengan karena ini udah berbicara PJUTS tetapi juga bisa sekalian juga dengan PLTS atap Pak Ketua. Jadi prioritas pelaksanaan PJUTS dan PLTS atap TA 2022, termasuk dengan meningkatkan pengawasan kinerja kontraktor di lapangan, meningkatkan kualitas mutu produk serta mempermudah proses.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, setuju ya?.

(RAPAT : SETUJU)

Poin 6, lanjut

6. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk berkoordinasi dengan PT PLN persero khususnya terkait kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang terjadi secara paralel atau *overlap*, misalnya kegiatan sambung listrik agar program dapat tepat sasaran.

Coba *monggo*.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, sebelum, buat saya ini mendorong ...*(suara tidak jelas)*... bukan saja berkoordinasi, tapi termasuk melakukan *adjustment* validasi data. Jadi kayak di Maluku itu ada alokasi dana untuk sambung baru dari Pemda provinsi Maluku walaupun tidak besar. Kemudian katanya dari kawan-kawan yang lain ada dana CSR sendiri dari PLN, walaupun itu mungkin *case by case* ya per wilayah untuk juga sambung baru di luar anggaran sambung baru yang dari Kementerian ESDM. Jadi mungkin ditambahkan sekaligus melakukan

adjustment validasi data, validasi data program yang sama dari berbagai sumber yang berbeda.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Data program begitu saja, khususnya terkait kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, saya pikir itu ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya dari sumber anggaran yang berbeda mesti ditambah Pak, sumber anggaran yang berbeda.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Program yang sama.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Dari sumber anggaran yang berbeda, khususnya terkait kegiatan, langsung aja daripada kok jadi berbelit-belit. Dari sumber anggaran yang berbeda khususnya untuk kegiatan bantuan BPBL program terkait kegiatan BPBL ya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Apa singkatannya pemasangan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Bantuan Pasang Baru Listrik, iya udah langsung titik aja.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sip, udah gitu aja ya cukup ya, setuju.

(RAPAT : SETUJU)

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin sebelum masuk di poin 7 *stressing* saja kepada kementerian.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Belum masuk nih.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Enggak maksudnya di poin 6 ini setuju yang modelnya seperti begini, tapi ada catatan kakinya kita harus dapat data clear. Begitu di-SK-kan itu data konkritnya harus keluar, *by name by address* mana yang dari Pemda, mana yang dari PLN dan mana yang dari kementerian. Kalau nggak bisa jadi masuk ke mana-mana dan dianggap itu ngambil dari kita, padahal ada dana lain-lain misalnya, kira-kira gitu Pak. Ini hanya catatan aja, nggak usah dimasukin ini sebagai catatan atensi bersama kita semua aja.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, cukup bisa dipahami terima kasih. Point ke 7 sekarang, masuk.

7. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menggunakan data tingkat dusun dan KK dalam pelaksanaan program elektrifikasi demi pemerataan listrik di daerah, termasuk melalui revisi undang-undang.

Apa ini, silakan.

DIRJEN KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. RIDA MULYANA, M.Sc.):

Inikan, izin kami dengan Bu Ratna, Bu Diah kan selalu berdiskusi mengenai kevaliditas Pak, angka yang sudah tinggi 99,45% gitu sementara di lapangan kan ditemukan yang tidak sesuai dengan itu. Masalahnya kemudian ini berpulang terhadap definisi ratio elektrifikasi sendiri, meskipun kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kami menggunakan dua indikator Pak. Ratio elektrifikasi yang berdasarkan rumah tangga, *regardless* itu di listrik oleh PLN atau tidak, itu satu dulu. Yang kedua, rasio desa berlistrik Pak, hanya saja kadang-kadang Ibu-ibu tuh melihat ratio elektrifikasi itu melihatnya sebagai rasio desa berlistrik. Itu agak mohon maaf, agak *miss* apa Pak, ini kalau tertulis seperti ini, ini kan seolah-olah rasio elektrifikasi yang selama ini kita laporkan tidak berdasarkan KK Pak. Padahal hitungan rasio elektrifikasi bukan desa berlistrik sudah berdasarkan KK Pak dan KK itu adalah KK yang berdasarkan data BPS, kita tidak ngarang-ngarang.

Gampang sekali Pak, data rumah tangga yang berlistrik tinggal minta ke PLN, ada ID Pel-nya R1, R2, R3 dapat Pak. Data rumah tangga seluruh Indonesia mau tahun berapa, tiap tahun ada, tinggal ngebagikan aja itu kemudian dapat data rasio elektrifikasi yang kita kenal, angkanya 99 itu emang agak tinggi karena kombinasinya ada tiga Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Satu yang bersumber dari yang listrik dari PLN sendiri, pasti di bawah 99% itu,

ada yang dilistriki dengan LTSHE Ibu-ibu pasti kenal 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ada itu. Dan yang ketiganya adalah yang dilistriki oleh Pemda atau swadaya masyarakat sendiri.

Kombinasi itu semua itu yang kemudian menghasilkan angka 99,45% itu, jadi *by* definisi menurut kami, tidak perlu lagi sampai menengok ke undang-undang Pak karena udah langsung RT rumah tangga, per rumah tangga total, sangat jelas. Beda sekali dengan desa dengan desa total Pak, yang tidak tahu itu juga kan agak sedikit mengaburkan karena ada 1 rumah di desa itu berlistrik, udah dianggap desa itu sudah berlistrik, itu memang keliru tapi faktanya seperti itu. Tapi kan fokus kita kan ke rumah tangga Pak yang didefinisikan dalam rasio elektrifikasi. Jadi ratio elektrifikasi sudah per rumah tangga Bu, sudah per-KK dan itu datanya kita tidak ngarang, satu ngambil dari BPS, satu ngambil dari PLN, tinggal dibagi dapat, itu yang PLN punya.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya, mohon maaf Pimpinan izin.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dimaafkan Bu, silakan.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Betul Pak kan Bapak sudah menjelaskan tentang itu bahwa rumah tangga, oke *clear* kita terima bahwa itu adalah data rumah tangga. Namun ketika kita punya program-program listrik masuk ke rumah tangga itu ternyata juga masih nggak habis-habis gitu ya, masyarakat yang butuh itu masih sangat banyak itu berarti angka 99,5% ini kan juga jadi tanda tanya. Makanya pertanyaan saya tadi, yang Bapak katakan bahwa komponen dari rasio elektrifikasi itu ada yang berasal dari PLN, ada yang berasal Pemda, ada yang berasal dari lain-lainlah macam-macam seperti itu, itu komposisinya seperti apa, berapa persen yang dari Pemda, berapa persen dan yang dari Pemda itu dialirkannya lewat mana, pakai PLN lagi juga kah gitu ya atau Pemda memang punya jaringan tersendiri, meteran sendiri gitu kan.

Nah, saya khawatir Pemda pasang, membantu pasang listrik pakai jaringannya PLN juga, pakai meterannya PLN juga. Jadi kemudian nanti apa namanya dihitung sebagai bagian yang dialiri oleh Pemda, dihitung juga dialiri oleh PLN. Makanya tadi saya tanya komposisinya berapa, saya percaya pada penjelasan Bapak dan kita sudah diskusi itu, hanya saya ingin tahu komposisinya dari data 99,5% itu.

Itu Pimpinan, terima kasih.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pimpinan, masih yang sama.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Mbak BMW, yang satu Mbak Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi untuk urusan elektrifikasi kelistrikan di tingkat implementasinya ini variatif, ada yang elektrifikasi 100% baru per kecamatan karena belum seluruh desa di kecamatan itu 100% elektrifikasi, apalagi turun sampai ke desa, apalagi turun sampai ke dusun. Jadi buat saya sebenarnya kalau kita mau mengkongkritkan saja adalah urusan kita ini dengan PLN ya sesungguhnya karena kalau dengan Pemda, seluruh program Pemda dengan PLN dalam bentuk KSO, kerjasama operasi hancur total Pak, gagal, Gatot, gagal total. Ada yang jalan, ada yang dibangun tapi rumahnya saja, rumah mesin begitu beli mesin tidak sesuai spek dan lain-lain. Dan ini ada di beberapa tempat terjadinya di Maluku dan sampai dengan hari ini PLN tidak mau serah terima bentuk-bentuk kerjasama KSO yang tidak sesuai dengan spek gitu loh, walaupun misalnya ada yang memang pada akhirnya terjadi serah terima semuanya menjadi bagian yang dikerjakan oleh PLN, tidak lagi menjadi bagian yang kerjakan oleh Pemda.

Yang ketiga, skema yang ke-3 yang dikerjakan yang pembangkitnya disediakan oleh masyarakat Pak, *on and off*. Kami ini di pulau-pulau kecil Pak, rata-rata semua pulau kecil pasti punya genset, tapi dia hanya nyala pas ada *event* aja Pak, ada *event* gereja, ada *event* kegiatan muslim atau ada *event* acara-acara tertentu, atau kalau anak-anak mau ujian itu gensetnya baru dipasang karena nggak ada bahan bakarnya Pak. Bahan bakar itu mereka rentengan di dalam kampung itu di pulau itu, jualan kelapa, jualan apa saja dapat itu harga baru mereka jalanin itu generator.

Jadi pertanyaannya adalah apakah yang kayak begini kita masih hitung lagi bagian dari elektrifikasi, buat saya ini negara ini sangat tidak adil gitu loh. Kalau di daerah lain mereka bisa ceklek menikmati listrik dengan begitu mudahnya, kita yang di wilayah-wilayah yang sulit dihadapkan dengan situasi-situasi begini dan harus *take for granted* dihitung sebagai bagian elektrifikasi, ini kan sangat sedih banget gitu loh.

Jadi buat saya baiknya kita hitung *clear* aja, keluarkan itu yang unsur dukungan dari masyarakat. Masyarakat yang menyediakan listrik di kampung-kampung itu karena buat saya mereka tidak akan menggunakan genset itu 1 kali 24 jam selama 365 hari, percayalah Pak karena kita ini yang bertemu langsung dengan masyarakat di pulau-pulau kecil ini, fakta di lapangan memang demikian, jadi kalau itu dikeluarkan yang punya Pemda itu dikeluarkan karena kalau Pemda udah serahkan pasti dikelola oleh PLN. Maka yang tersisa pasti cuman PLN saja, jadi mungkin itulah yang nanti kita akan hitung sebagai bagian dari elektrifikasi murni jadi kita bisa bergerak bersama-sama, jadi bisa lebih mudah kita apa namanya membuat kebijakan untuk elektrifikasi ini, kira-

kira gitu tanpa mengurangi ya bahwa memang hitungannya *by* KK, tapi *by* KK yang *firm* gitu loh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi konkretnya jadi poin nomor 7 ini mau kita apain nih Mbak Mercy, Mbak Diah dan Mbak Ratna yang paling Juwita.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk buat saya, ini kan kesepakatan kita aja loh kita ini sudah di tingkat nasional, jadi kita putuskan aja.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi gini aja, ini kan pembahasan kan panjang ya atau kita agendakan aja khusus terkait masalah isu rasio elektrifikasi, jadi nggak usah kita masukkan dalam poin ini, didrop aja ya, jadi kita drop aja. Jadi nanti ini sekedar jadi catatan aja nanti kita bahas khususlah terkait mengenai binatang yang namanya rasio elektrifikasi itu, cocok?

Masuk poin ke-7 kembali.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, sebelum masuk di poin jawaban-jawaban tertulis ini tadi itu ada satu atensi saya khusus untuk Badan Diklat Kementerian ESDM. Saya minta mungkin ada satu kesimpulan khusus, Komisi VII DPR RI apa ya mendorong Badan Diklat Kementerian ESDM untuk program distribusi, program distribusi apa istilahnya hasil lulusan Akamigas Blok Cepu.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Mbak, itu Badan Diklat bukannya udah di, maksudnya ini di BPSDM, bukan Badan Diklat mungkin BPSDM.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya Namanya sekarang BPSDM *sorry*, Komisi VII DPR RI mendorong Kepala BPSDM, kepalanya nggak usah, Kementerian ESDM RI untuk mengimplementasikan program distribusi lulusan, distribusi mengimplementasikan program distribusi lulusan Akamigas Blok Cepu dengan pendekatan yang berkeadilan antara penerima beasiswa dari kementerian maupun beasiswa dari dana APBD kabupaten kota daerah penghasil migas. Mengimplementasikan program distribusi lulusan Akamigas Blok Cepu yang

berkesinambungan dan berkeadilan, baik dari lulusan, baik yang menerima, baik lulusan yang menerima beasiswa kementerian maupun beasiswa dari kabupaten kota penghasil migas.

Jadi maksudnya intinya ini adalah mau itu beasiswanya dari mana begitu udah masuk dalam skema di Blok Cepu ini yang harus berkeadilan dong didistribusikan, jangan diprioritaskan yang dari beasiswa kementerian sisanya 1-2, 1-2 baru ini dari yang, ini APBD murni sudah dikeluarkan jauh-jauh kabupatennya yang miskin-miskin ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagaimana, gimana Mbak redaksinya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mengimplementasikan program distribusi, inikan program pendistribusian kan di dalam sini kan ada satu program yang tadi dengan apa namanya itu bagan-bagannya dan perinciannya itu, program distribusi lulusan Akamigas Blok Cepu yang berkesinambungan agar bukan yang, agar berkesinambungan dan berkeadilan, berkesinambungan dan berkeadilan baik lulusan yang menerima beasiswa dari kementerian maupun beasiswa dari kabupaten kota penghasil migas.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN ESDM RI:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan, bagaimana Pak.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN ESDM RI (PRAHORO YULIJANTO NURTJAHYO, P. HD):

Ini mungkin *match* diskusinya Bu Mercy ya, jadi nama dulu nanti sama referensinya jadi PEM Akamigas jadi nggak ada blok Cepunya PEM Akamigas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Politeknik yang lulusan PEM Akamigas jadi satu ya, Akamigas. Jadi Politeknik yang ada di KL itu tidak ikatan dinas, artinya kita ini artinya lulusan kita ini akan *fight* dan kalau kita melihat sebelum pandemi lulusan kita itu diterima di industri 78%. Jadi di era pandemi ini tahun 2020 kita 65%, kemudian tahun kemarin tahun 2021 kita sekitar masih 41 kurang lebih ya, jadi kurang lebih angkanya di sana.

Artinya apa? Untuk bisa bertemu dengan industri, mereka akan melakukan. Jadi kita mengantarkan di sampai level pembekalan kemudian kita juga mempunyai program-program meng-*engage* dengan industri tapi *end of the day* mereka nanti ini kita sudah bekal dan program yang kita lakukan sudah

membuktikan bahwa 4 tahun terakhir ini tidak kosong, mereka bisa bersaing dengan industri.

Dan tadi disampaikan juga dari Pemda, itu sebenarnya juga tidak kosong juga, mereka tidak semuanya, memang ada beberapa yang tidak diterima ketika bertarung seperti ini, tidak kosongan. Mereka kalau kita lihat datanya mungkin nanti kita sampaikan ya Bu Mercy ya, jadi ke Tanimbar, Aru dan lain-lain Maluku Barat Daya memang ada yang tidak diterima ketika di bekerja karena memang kondisinya saat ini masih kondisi seperti ini, tapi ada juga yang *fight* dan mereka bisa diterima.

Artinya memang kalau dari kemarin ada 8 yang diterima 10 tidak dari 18 dan kita punya datanya yang seperti itu. Jadi biar nanti meluruskan saja bahwa kalau ini *statement* ini kan seolah-olah seperti program ini ikatan dinas, ini tidak ikatan dinas. Jadi pada dasarnya kita menyiapkan mereka bisa bertarung dan data membuktikan itu.

Terima kasih Pak Pimpinan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, saya sungguh sangat mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, mungkin kata program kita coba tarik keluar ya. Jadi sepertinya ini bukan semacam satu program yang ikatan dinas atau apa ya. Tetapi biar bagaimanapun ini kan ada *by design* kan, ini sama-sama kita berbicara dan saya kira dari sebelum Bapak jadi Kepala Badan juga udah dari kepala-kepala badan yang lain kita bicara panjang lebar soal ini. Jadi ini karena *by design*, jadi kalau *by design* itu artinya harus ada spirit keberpihakan juga gitu loh bahwa ini anak-anak yang lulusan ini jangan diabaikan, tetapi *channel*, ruang, jaringan dan lain-lain itu sedapat mungkin jika ada ruang yang cukup mereka bisa diarahkan ke sana.

Kalau yang ada sudah di daerah-daerah yang sudah maju secara industri Bapak-bapak sekalian, kalau mau dibilang berkompetisi secara intelektual udah kita kalah jauh, dari langit dan bumi lah Pak. Jadi mestinya harus ada afirmatif kebijakan di internal Kepala Badan sendiri, di internal BPSDM sendiri. Kalau yang dari ujung timur Indonesia disuruh bertarung dengan anak Jakarta, anak dari Jawa ya matilah kita, kita nggak bakalan dapat apa-apa Pak karena dari semangat awal ini, ini diupayakan dengan pendekatan *by design* sehingga dari ujung perbatasan Kalimantan, Sumatera, ujung perbatasan Papua, Aru dan lain-lain ada ruang yang cukup walaupun dari sisi intelektualitas, dari sisi macam-macam mungkin kalah jauh sekali dengan yang dari daerah-daerah yang sudah maju secara industri.

Saya kira itu Pak, mereka ada di sini kan juga sebenarnya untuk meningkatkan kapasitasnya. Suatu saat yang sporadik seperti ini, diaspora seperti ini di Indonesia begitu proyek besar misalnya di Blok Masela atau blok-blok yang lain ini mereka bisa diserap dan dibawa kembali lagi ke daerah asal, kan tujuannya itu.

Saya kira itu Pak Ketua, jadi tanpa mengurangi maksud dari poin 7 ini mungkin kata programnya aja yang kita keluarkan, mengimplementasikan apa namanya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, intinya inikan sebetulnya yang diharapkan bahwa Kementerian ESDM bisa ikut menjadi perpanjangan dalam pendistribusian para alumni-alumni yang sudah belajar dan mondok di padepokan yang namanya Akamigas itu, begitukan ya, begitulah kurang lebih. Saya pikir ini normatiflah, saya rasa ini juga nggak ada masalah dan saya pikir oke kan dan cuma kan ditambahin agar antara dari kementerian maupun kabupaten prinsipnya disamakan kan begitu Pak.

Saya rasa cocok Pak ya?.

(RAPAT : SETUJU)

Terakhir, saya rasa yang ke-8 intinya semua dijawab secara tertulis paling telat tanggal 10 Juni, cukup ya?

(RAPAT : SETUJU)

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Bisa izin Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Pertama, jawaban tertulis biasanya seminggu Pak dari saat pelaksanaan biasanya itu satu Pak, mohon itu yang pertama. Tapi yang kedua yang penting ini Pak, tadi kita di dalam bicara terkait dengan BPBL Pak. Ini kan terkait dengan kuota Pak, jadi mungkin tadi kita sepakat apa tidak sebaiknya kita tulis dalam diangkat dalam kuota, *region* atau.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, mungkin di poin nomor 2 kali, artinya poin nomor 2 ditambahkan, tambahkan poin nomor 2. Silakan Pak redaksinya Pak, tambahan nomor 2.

Ya, silakan Pak apa redaksinya.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Mohon izin Ibu/Bapak. Terima kasih Pak Pimpinan yang ganten terus. Mungkin yang pertama mungkin menggunakan kalimat awal yang di atas kalau boleh bersepakat ya. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kementerian ESDM mungkin untuk memprioritaskan daerah 3T Pak kalau boleh, daerah perbatasan iya dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan program BPBL, Bantuan Pemasangan Baru Listrik atau Bantuan Pasang Baru Listrik boleh. Artinya tidak menggunakan pola 321 ya Pak Maman ya jadi sangat tergantung dari usulan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kan pada prinsipnya kan begini Pak, jika setiap daerah ataupun setiap orang pastikan situasi berbeda-beda dan kita memasukkan untuk memprioritaskan wilayah-wilayah ini. Tapi walaupun memang nanti ada teman-teman Pimpinan atau yang lain mau mengusulkan *monggo* saja, enggak ada masalah tapi kita tetap punya *guidance* bahwa yang diprioritaskan oleh daerah 3T dan daerah perbatasan dalam pelaksanaan program bantuan pasang listrik, itu saja cocok ya.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Pak, mohon maaf, mohon maaf, ini sangat operasional nanti ini temen-teman belakang biasanya bisikin saya. Inikan data menjadi kunci ya Pak ya dan ini kan ada yang mohon maaf, ada yang sangat rajin sekali, ada yang malah mungkin adanya program ini juga mungkin tidak juga menarik perhatian Pak. Buat kami kan nanti pada saatnya syukur-syukur masih dibawah kuota Pak Maman, tapi sekiranya nanti melebihi, kalau boleh nanti kami mohon izin untuk menerapkan *first come first serve* Pak ya, toh ini tidak berhenti di 2022. Jadi nanti 2023 berlanjut, jadi kalau sekiranya ada data, kuotanya masih ada ya mohon izin saya menggunakan yang pertama datang untuk dilayani.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sip, saya yakin cukup Pak, karena kan tadi, karena kan tadi kan yang Bapak tampilkan yang kalau masuk dalam program *adjustment* apa tadi namanya tuh, *automatic adjustment* keren kali kalau Kementerian Keuangan bikin-bikin istilah nih. Yang masuk dalam program *automatic adjustment* itu kan kurang lebih awalnya tadi berapa 50.000-an ya Pak, 60.000 ya, 60.000 titik, 80.000 titik. Namun kan karena tadi *automatic adjustment*-nya *moving to another place* jadi itu sekitar berapa Pak, 160.000-an ya. Oh ya nggak maksud saya tadi begini, total itu Pak kalau nggak kena *automatic adjustment* itu berapa? 120 miliar, oke 80.000 rumah tangga. Itukan tadi total ada 80.000 rumah tangga yang ini memang yang masih bisa kita distribusikan ke seluruh Indonesia, yang menjadi prioritas kita tentunya tadi daerah-daerah 3T, daerah

perbatasan dan daerah yang lain yang memang saya pikir itu nggak ada masalah Pak, toh juga nanti kan dalam waktu dekat juga kita anggarkan lagi.

Cocok, cocok ya? Oke, kalau begitu itu tanggalnya, silakan, berapa seminggu, 13 Juni.

Terima kasih rekan-rekan Anggota Komisi VII dan Bapak-bapak Kementerian ESDM atas partisipasinya dalam RDP kita ini.

Silakan Pak Sekjen ESDM apabila ada sepele kata, dua patah kata monggo.

SEKJEN KEMENTERIAN ESDM RI (DR. IR. EGO SYAHRIAL, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas selesainya rapat dengar pendapat dengan agenda tunggal hari ini adalah proses pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022.

Terima kasih kami akan menindaklanjuti kesimpulan yang baru saja ditayangkan. Demikian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih semuanya.

Oleh karena itu rapat ini resmi saya tutup, semoga kita bisa pulang dengan selamat sampai di tujuan.

Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002